

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah kota Bandung

4.1.1 Profil Daerah

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung secara geografis terletak antara 107^o bujur timur dan 6^o55' lintang selatan dan secara administratif terdiri dari 26 kecamatan. Kota ini dikelilingi oleh kabupaten Bandung dan terletak pada lokasi yang strategis dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Posisinya pada poros jalan raya barat-timur yang memudahkan hubungan dengan ibukota Jakarta, dan utara-selatan yang memudahkan akses ke daerah perkebunan di Subang dan Pengalengan, letaknya yang tidak terisolasi, dan jalur komunikasinya baik dan Iklim kota ini merupakan iklim pegunungan yang lembab dan sejuk.

4.1.2 Visi Pemerintah Kota Bandung

“Meningkatkan Kota Bandung sebagai kota jasa menuju terwujudnya kota yang genah, merenah, tumaninah”.

- Genah : mengandung arti : senang, nyaman, aman, tenang, tenteram, kerasan, bahagia.
- Merenah : mengandung arti : rapih, indah, tertib, teratur, nyaman, serasi, tepat, benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya.

- Tumaninah : mengandung arti : bahagia, tenang, menumbuhkan kepuasan batiniah, erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan.

Genah Merenah Tumaninah adalah rasa, berhubungan dengan perasaan yang tercipta karena hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan penciptanya. Semua itu akan dapat diwujudkan apabila bekerja, berkarya, taat azas, peka terhadap berbagai masalah, bisa memilih yang benar dan salah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Disamping itu juga, dituntut tetap menghormati, memakai dan melaksanakan berbagai amanat leluhur yang tercermin dalam adat istiadat, tradisi, dan budaya setempat, yang relevan dengan ajaran agama.

4.1.3 Misi Pemerintah Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat

dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.1.4 Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan Pemerintah kota Bandung

4.1.4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran secara skematik tentang bagian-bagian dan tugas-tugas, tanggung jawab serta hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau suatu lembaga

Adapun tujuan mengorganisir salah satunya adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas, membagi-bagi suatu tugas kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan.

Sesuai dengan peraturan daerah kota Bandung No.03 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi sekretariat daerah kota Bandung maka di bawah ini akan diuraikan secara singkat struktur organisasi pemerintah kota Bandung sebagai berikut :

1. Walikota
2. Wakil walikota, terdiri dari :
 1. Sekretaris daerah
 2. Asisten tata praja, terdiri dari :
 - a. Bagian bina pemerintahan dan otonomi daerah, yang membawahi :
 - Sub bagian pengembangan otonomi daerah
 - Sub bagian bina pemerintah kecamatan
 - Sub bagian bina pemerintah kelurahan
 - Sub bagian hubungan antar lembaga
 - b. Bagian hukum, membawahi :
 - Sub bagian peraturan perundang-undangan
 - Sub bagian bantuan hukum
 - Sub bagian administrasi dan bantuan hukum
 - Sub bagian pengkajian dan evaluasi
 - c. Bagian organisasi, membawahi :
 - Sub bagian kelembagaan
 - Sub bagian ketatalaksanaan
 - Sub bagian analisa formasi jabatan
 - Sub bagian data dan sistem informasi

3. Asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
 - a. Bagian ekonomi, membawahi :
 - Sub bagian bina produksi dan distribusi
 - Sub bagian sarana dan prasarana ekonomi
 - Sub bagian administrasi pendayagunaan BUMD
 - b. Bagian pembangunan, membawahi :
 - Sub bagian penyusunan program
 - Sub bagian administrasi pengendalian program
 - Sub bagian evaluasi dan pelaporan
 - c. Bagian kesejahteraan rakyat, membawahi :
 - Sub bagian kesejahteraan sosial
 - Sub bagian bintal dan agama
 - Sub bagian pemuda dan olahraga
 - d. Bagian pemberdayaan perempuan, membawahi :
 - Sub bagian analisa kebijakan pemberdayaan perempuan
 - Sub bagian pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan
 - Sub bagian evaluasi dan pelaporan
4. Asisten administrasi, terdiri dari :
 - a. Bagian keuangan, membawahi :
 - Sub bagian anggaran
 - Sub bagian perbendaharaan
 - Sub bagian verifikasi

- Sub bagian belanja pegawai
 - Sub bagian pembukuan
- b. Bagian kepegawaian, membawahi :
- Sub bagian umum kepegawaian
 - Sub bagian mutasi pegawai
 - Sub bagian pengembangan karir
- c. Bagian umum, membawahi :
- Sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat
 - Sub bagian rumah tangga
 - Sub bagian protokol
 - Sub bagian sandi dan telekomunikasi
- d. Bagian perlengkapan, membawahi :
- Sub bagian inventarisasi dan analisa kebutuhan
 - Sub bagian administrasi dan pengadaan
 - Sub bagian penyimpanan aset daerah

4.1.4.2 Visi & Misi Dipenda Kota Bandung

4.1.4.2.1 Visi Unit Kerja Dipenda Kota Bandung

“Profesional dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, prima dalam pelayanan”.

4.1.4.2.2 Misi Dipenda Kota Bandung

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh dinas yang akan datang. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dinas pendapatan daerah adalah :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mewujudkan kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak
- c. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak
- d. Menciptakan akuntabilitas publik
- e. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintahan
- g. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan profesional.
- h. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.
- i. Meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

- j. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan terjadi feedback yang positif (timbul kesadaran untuk membayar pajak)
- k. Mewujudkan aparatur dinas pendapatan daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.

Motto dinas pendapatan daerah adalah “Kuingin engkau tersenyum puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas dinas pendapatan daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap wajib pajak /wajib retribusi, sehingga wajib pajak /wajib retribusi merasakan bahwa pajak dan retribusi bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi arena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

4.1.4.3 Tujuan dan Sasaran Dipenda Kota Bandung

4.1.4.3.1 Tujuan Dipenda Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) atau 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka dinas pendapatan daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan kota Bandung sebagai kota jasa, menuju terwujudnya kota yang genah, merenah, tumaninah, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak/wajib retribusi
3. Terwujudnya aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak/retribusi
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintahan.
6. Terwujudnya penegakan hukum
7. Terwujudnya sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan profesional
8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.

4.1.4.3.2 Sasaran Dipenda Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dinas pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajibannya dalam membayar pajak /retribusi
2. Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak/retribusi
3. Meningkatkan sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20% setiap tahun
4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, kerampilan, dan kejujuran petugas.

1.1.4.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

4.1.4.4.1 Kedudukan Dipenda Kota Bandung

Dipenda kota Bandung sebagaimana diatur dalam keputusan menteri dalam negeri No.23 tahun 1989 tanggal 29 mei 1989 sebagai pengganti keputusan mendagri No.KUPD 7/12/41-101 tahun 1978 dan perda kota Bandung No.05 tahun 2001 sebagai pengganti perda kotamadya DT II Bandung No.11 tahun 1989 , berkedudukan sebagai unsur pelaksana perda kota Bandung di bidang pendapatan daerah.

4.1.4.4.2 Tugas Pokok Dipenda Kota Bandung

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan.

4.1.4.4.3 Fungsi Dinas Dipenda Kota Bandung

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana termaksud di atas, dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah
- b. melaksanakan tugas teknis operasional bidang perencanaan, pajak, retribusi, pengendalian pendapatan serta PBB & BPHTB
- c. melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

1.1.4.5 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

(perda N0.05 tahun 2001)

Berdasarkan keputusan mendagri No.23 tahun 1989 tanggal 29 mei 1989 sebagai pengganti keputusan mendagri KUPD 7/12/41 No.10 tahun 1989 dan perda No.05 tahun 2001 sebagai pengganti perda No.11 tahun 1989, secara garis besar susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota Bandung terdiri dari :

- I. Kepala dinas pendapatan daerah
- II. Kepala bagian tata usaha, membawahi:
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian kepegawaian
- III. Sub dinas perencanaan program, membawahi :
 1. Seksi penyusunan program Litbang
 2. Seksi identifikasi dan ekstensifikasi

3. Seksi penyuluhan

IV. Sub dinas pajak, membawahi :

1. Seksi pendaftaran dan pendataan
2. Seksi penetapan
3. Seksi pembukuan dan pelaporan

V. Sub dinas retribusi, membawahi :

1. Seksi pendaftaran dan pendataan
2. Seksi penetapan
3. Seksi pembukuan dan pelaporan

VI. Sub dinas pengendalian, membawahi :

1. Seksi verifikasi dan penyitaan
2. Seksi pengendalian dan penerimaan lain-lain
3. Seksi tunggakan dan keberatan

VII. Sub dinas PBB dan BPHTB, membawahi :

1. Seksi penagihan
2. Seksi tunggakan dan keberatan
3. Seksi administrasi BPHTB

VIII. Cabang dinas

IX. UPTD

X. Kelompok jabatan fungsional

4.2 Analisis Data

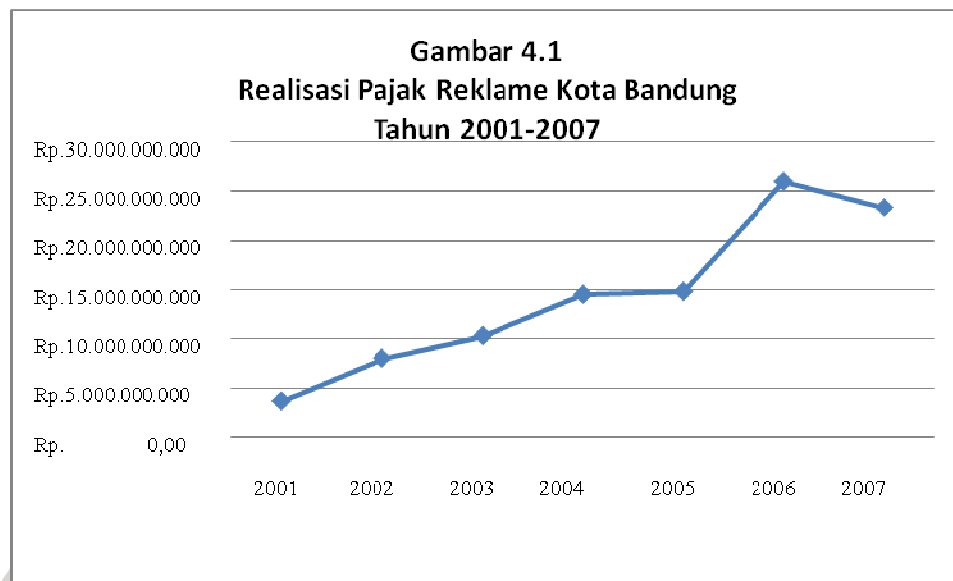
4.2.1 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2001 Hingga tahun 2007

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak reklame di kota Bandung pasca otonomi daerah, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2007, dapat dilihat dari tabel dan gambar grafik sebagai berikut ini :

Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan Pajak Reklame di kota Bandung

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan %
1	2001	3.600.800.167	-	-
2	2002	7.971.603.520	4.370.803.353	121,38%
3	2003	10.302.704.425	2.331.100.900	29,24%
4	2004	14.537.650.645	4.234.946.220	41,10%
5	2005	14.841.995.565	304.344.920	2,09%
6	2006	26.103.431.700	11.261.436.140	75,87%
7	2007	23.416.691.000	2.686.740.700*	-10,29%
Jumlah/ Rata-rata		100.774.877.000		$\bar{X} = 37\%$

Sumber : Laporan realisasi PAD kota Bandung (data diolah)



Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak reklame di kota Bandung pasca otonomi daerah mengalami kenaikan dari tahun 2001 sampai dengan 2006. Dapat dilihat pada tahun 2002 setahun setelah otonomi daerah, realisasi pajak reklame meningkat sebesar 121% dari tahun 2001. Kenaikan ini merupakan kenaikan yang paling besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal ini merupakan awal yang baik setelah diberlakukannya otonomi daerah sehingga kewenangan keuangan daerah diserahkan sepenuhnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu kenaikan tersebut dipengaruhi oleh jumlah reklame yang sangat banyak dengan total reklame 11.860 buah reklame. Diantaranya reklame papan sebanyak 8357 buah, spanduk 3336 buah, balon 19 buah, kendaraan 148 buah. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2001 yang data di Dipenda hanya terdapat papan sebanyak 98 buah, spanduk 69 buah dan kendaraan 1 buah. Maka kenaikan atau penurunan penerimaan pajak reklame juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah reklame tersebut.

Begitu juga pada tahun 2003 sampai dengan 2006, realisasi pajak reklame berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 29,24%, 41,10%, 2,09%, 75,87%. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan baru yaitu peraturan daerah No.08 tahun 2003 tentang pajak reklame yang menggantikan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Bandung No.18 tahun 2001 tentang pajak reklame. Dalam peraturan daerah No.08 Tahun 2003 tersebut lebih menjelaskan subjek dan objek pajak reklame, wajib pajak reklame, masa pajak dan ketentuan tarif reklame. Di samping itu dalam peraturan tersebut lebih ditegaskan tentang tata cara pembayaran sanksi yang lebih tegas dan perhitungan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) yang sudah menggunakan bobot dan skor untuk jenis reklame dan nilai jual objek reklame (NJOR) yang lebih besar dari tahun 2001 .

Tahun 2004 mengalami kenaikan penerimaan pajak reklame dengan pertumbuhan sebesar 41,10% dari tahun 2003. Hal ini dipengaruhi oleh Bandung sebagai kota wisata yang dicanangkan sejak tahun 2004 dimana meningkatnya penyelenggaraan reklame khususnya reklame hotel, restoran dan reklame factory outlet. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah reklame dari tahun 2003. Pada tahun 2003 jumlah keseluruhan reklame sebanyak 6199 buah, sedangkan tahun 2004 meningkat jumlahnya sebanyak 7972. Adapun jenis reklame papan/billboard yang paling mendominasi jumlah reklame sebanyak 5486 buah, sisanya jenis reklame spanduk 2346 buah, balon 15 buah dan kendaraan 125 buah. Klasifikasi jenis reklame yang paling banyak adalah jenis reklame yang cenderung konsumtif seperti reklame rokok, reklame motor, reklame produk makanan dan minuman. Selain itu reklame Bank rata-rata mendominasi untuk

reklame papan/billboard. Peningkatan ini juga berdampak kepada pajak daerah dengan meningkat sebesar 13,77% dan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 2,71%.

Tahun 2005 pertumbuhan pajak reklame hanya naik sebesar 2,09% dari tahun 2004. Walaupun begitu target pajak reklame tercapai sebesar 106,01%. Kenaikan yang hanya 2,09% ini dipengaruhi oleh jumlah reklame yang semakin berkurang dibandingkan tahun 2004. Adapun di tahun 2004 jumlahnya 7972 buah reklame sedangkan di tahun 2005 jumlahnya turun menjadi 6898 buah. Dengan perincian reklame papan 5449 buah, spanduk 1346 buah, balon udara 6 buah dan reklame kendaraan 97 buah.

Tahun 2006 terjadi kenaikan yang cukup pesat sebesar 75,87% dibandingkan tahun 2005. Adapun realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 139,40%. Kenaikan ini sangat baik bagi pemerintah karena akan mempengaruhi peningkatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Pajak daerah meningkat sebesar 15,11% dan PAD meningkat sebesar 13,11%. Adapun faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut antara lain meningkatnya jumlah reklame sebesar 8034 buah dari tahun 2005 yang hanya berjumlah 6898 buah. Begitu juga jenis reklame yang paling banyak adalah reklame papan sebanyak 6745 buah dimana reklame papan/billboard merupakan sumber penerimaan terbesar dari pajak reklame. Selanjutnya spanduk yang berjumlah 1073 buah, balon udara 8 buah, kendaraan 190 buah dan bando (jembatan penyebrangan orang) 18 buah. Klasifikasi jenis reklame yang paling banyak adalah reklame rokok, produk makanan dan minuman dan reklame telekomunikasi seperti produk

handphone dan reklame operator pulsa. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajaknya yang mentaati peraturan tentang pajak reklame dalam membayar pajak reklame tersebut.

Sedangkan tahun 2007 pajak reklame mengalami penurunan sebesar 10,29%. Hal ini disebabkan tingginya tunggakan pajak reklame oleh wajib pajak reklame pada tahun tersebut. Selain itu yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak reklame pada tahun 2007 karena panitia khusus peraturan daerah reklame DPRD kota Bandung menetapkan enam titik sebagai kawasan bebas reklame. Kawasan tersebut antara lain Jln. Ir. H. Djuanda, Jl. Junjuran, Jl. Asia Afrika, Jl. Braga, Jl. Pajajaran, dan Jln. Cipaganti. Selain itu, Pansus juga menetapkan kawasan pendidikan, tempat ibadah, perumahan, taman kota, rumah sakit, dan kompleks militer sebagai kawasan bebas reklame. Dengan ditetapkannya kawasan bebas reklame tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung Yossi Irianto mengungkapkan :

“...ditetapkannya 6 kawasan tersebut sebagai kawasan bebas reklame maka pemerintah kota Bandung berpotensi kehilangan sekitar Rp.5,4 miliar dari pajak reklame. Selain itu penurunan terjadi akibat Sebanyak 3.000 reklame di Kota Bandung tidak dilengkapi izin atau masa izinnnya sudah habis”.

Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah karena tidak ada data yang akurat tentang lokasi papan reklame tersebut. Setelah mengetahui laju pertumbuhan pajak reklame, selanjutnya disajikan laju pertumbuhan pajak daerah yang merupakan sumber dari jenis pajak yang ada di kota Bandung. Berikut ini data laju pertumbuhan pajak daerah dan masing-masing jenis pajak daerah kota Bandung tahun 2001-2007 yang disajikan dalam tabel dan gambar grafik :

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah di Kota Bandung

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Perubahan	Pertumbuhan %
1	2001	73.583.061.471	-	
2	2002	103.153.173.908	29.570.112.430	40,18%
3	2003	117.392.948.578	14.239.774.600	13,80%
4	2004	133.554.985.000	16.162.036.500	13,77%
5	2005	143.107.822.771	9.552.837.700	7,15%
6	2006	164.781.409.646	21.623.586.900	15,14%
7	2007	189.474.951.000	24.743.541.400	15,02%
Jumlah		924.998.3522.200		X = 15%

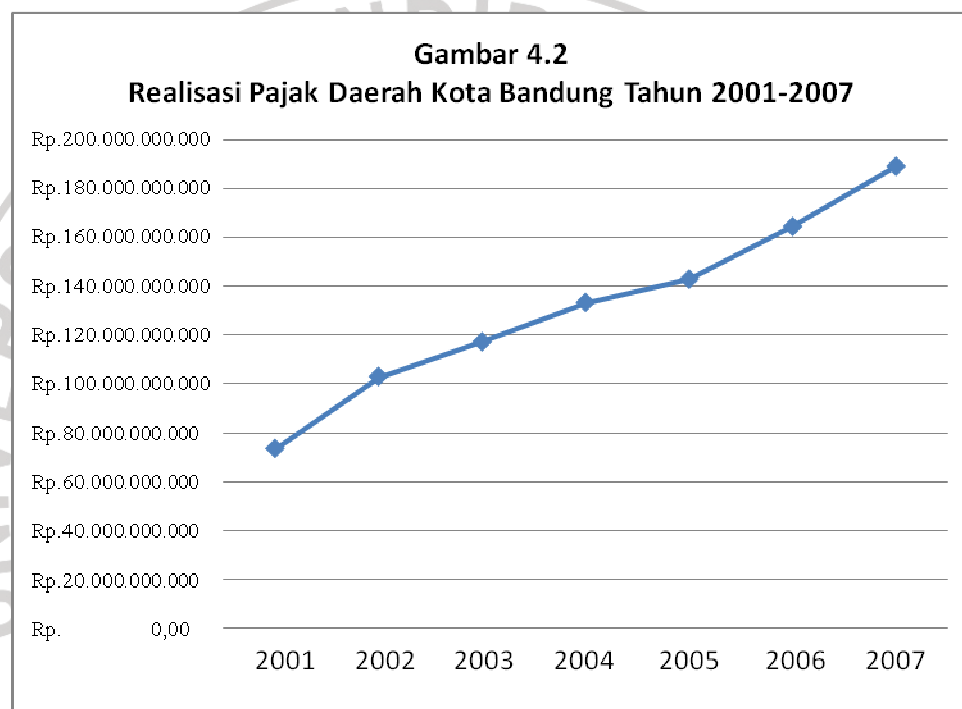
Sumber : Laporan realisasi pendapatan asli daerah kota Bandung (data diolah)

Tabel 4.3
Realisasi Komponen Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2001-2007

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2001-2007 (Rp 000)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pajak Hotel dan Pajak restoran	46.029.324	56.434.696	62.439.288	65.675.225	39.204.994	44.521.528	58.738.446
Pajak Hiburan	6.335.449	9.552.676	9.945.099	10.120.894	10.537.385	11.477.230	15.805.311
Pajak Reklame	3.600.800	7.971.603	10.302.704	16.211.576	14.841.996	26.103.432	23.416.691
Pajak Penerangan Jalan Umum	15.060.034	25.356.011	32.525.723	37.942.246	41.215.768	42.937.687	39.717.958
Pajak pemanfaatan air bawah tanah/air	2.456.686	1.444.481	-	-	-	-	-

permukaan							
Pajak parkir	100.767	-	-	2.860.381	3.285.018	3.668.523	4.324.153
Pajak lainnya	-	2.494.196	-	-	-	-	-
Pajak rumah kost	-	-	-	2.916	57.756	115.705	-

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)



Seperti yang terlihat pada tabel realisasi komponen pajak daerah kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007 diatas terlihat perbandingan besarnya tiap-tiap jenis pajak daerah. Adapun penerimaan pajak terbesar diperoleh dari pajak hotel dan restoran. Walaupun sudah dipisah rekeningnya menjadi pajak hotel dan pajak restoran penerimaan dari pajak tersebut tetap paling besar dari penerimaan pajak daerah kota Bandung lainnya. Pajak reklame menempati posisi ke empat penerimaannya setelah pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan umum.

Berikut disajikan data laju pertumbuhan untuk tiap jenis pajak daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2007 dan kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pajak daerah kota Bandung tahun 2001-2007:

Tabel 4.4

Laju Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2001-2007

Jenis Pajak Daerah	Laju pertumbuhan (%)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pajak Hotel dan Pajak restoran	-	22,61%	10,64%	-	-	13,56%	31,93%
					40,30%	5,87%	34,81%
Pajak Hiburan	-	50,30%	4,44%	1,77%	4,12%	8,92%	37,71%
Pajak Reklame	-	121,38%	29,24%	41,10%	2,09%	75,87%	-
Pajak Penerangan Jalan Umum	-	68,37%	28,28%	16,65%	8,63%	4,18%	-
Pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan	-	-41,20%	-	-	-	-	-
Pajak parkir	-	-	-	-	14,85%	11,67%	17,87%
Pajak rumah kost	-	-	-	-	1880%	100,33%	-

Sumber : Data diolah

Tabel 4.5

Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2001-2007

Jenis Pajak Daerah	Kontribusi (%)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pajak Hotel dan Pajak restoran	62,55%	54,71%	53,19%	49,17%	27,40%	27,02	30,84%
Pajak Hiburan	8,61%	9,23%	8,47%	7,58%	7,36%	6,97	8,30%
Pajak Reklame	4,89%	7,66%	8,78%	12,14%	10,37%	15,84%	12,29%
Pajak Penerangan Jalan Umum	20,47%	24,58%	27,71%	28,41%	28,80%	26,06%	20,85%
Pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan	3,34%	1,4%	-	-	-	-	-
Pajak parkir	0,14%	-	-	2,14%	2,30%	2,23%	2,27%
Pajak lainnya	-	2,42%	-	-	-	-	-
Pajak rumah kost	-	-	-	0,0022%	0,040%	0,070	-

Sumber : Data diolah

Pada tabel penerimaan pajak daerah dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan 2007. Pada tahun 2001 saat dilakukannya otonomi daerah, target yang ingin dicapai pemerintah daerah kota Bandung pada sektor pajak daerah adalah Rp 66.450.000.000, namun realisasi yang dicapai adalah Rp 73.583.061.471,10 atau melebihi target sebesar 106,59%. Hal ini merupakan awal yang baik bagi pemerintah daerah kota Bandung dalam mengelola pajak daerah tersebut. Tetapi penerimaan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena realisasi pajak daerah angkanya masih

dibawah Rp.100.000.000.000. Dengan melihat potensi yang ada di kota Bandung maka pencapaian tersebut dapat melebihi target tiap tahunnya.

Pada tahun 2002 peningkatan pertumbuhan sebesar 40,19% dan tahun berikutnya pada tahun 2003 sampai dengan 2007 adalah sebesar 13,80%, 13,77%, 7,15%, 15,14%, 15,02%. Kenaikan pajak daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2002 dimana pajak hotel dan restoran merupakan kontribusi paling besar dengan 54,71% sedangkan pajak reklame hanya memberikan kontribusi sebesar 7,66%. Kenaikan ini merupakan kinerja yang baik oleh pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerahnya, Selain itu peningkatan terjadi disebabkan setelah otonomi daerah, kewenangan keuangan daerah dan pendapatan pajak daerah diserahkan sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kota Bandung dimana dibutuhkan penyesuaian dan adaptasi dalam penyusunan anggaran daerahnya. Dari sini dapat dilihat apakah ini tanda kota Bandung sudah siap menghadapi otonomi daerah atau pemerintah daerah sudah dapat mengoptimalkan potensi pajak daerah di kota Bandung.

Pada tahun 2003 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan 13,80% kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan dari komponen pajak daerah. seperti pajak hotel dan restoran dengan kontribusinya terhadap pajak daerah sebesar 53,18%, pajak hiburan 8,47%, pajak reklame 8,78%, dan pajak penerangan jalan sebesar 27,71%.

Peningkatan penerimaan pajak daerah juga terjadi pada tahun 2004 dimana laju pertumbuhannya sebesar 13,77%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dijadikannya Bandung sebagai kota wisata yang meningkatkan sektor pajak perhotelan dan

restoran, dan mengundang banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di kota Bandung. Seperti pajak hotel dan restoran rekeningnya sudah dipisah menjadi pajak hotel dan pajak restoran dalam anggaran kota Bandung meningkat dengan masing-masing memberikan kontribusi kepada pajak daerah sebesar 49% untuk pajak hotel dan 23% untuk pajak restoran. Sisanya dipengaruhi oleh pajak hiburan 7,5%, pajak reklame 12%, pajak penerangan jalan umum 28%, pajak parkir 2,14%. Kenaikan pajak daerah juga terjadi karena pemerintah kota Bandung menetapkan pajak baru yaitu pajak rumah kost yang pada tahun 2004 memberikan kontribusi 0,0022%

Pada tahun 2005 terjadi kenaikan pajak daerah sebesar 7,15%. Kenaikan ini tidak sebesar dari kenaikan pajak daerah pada tahun 2004. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan dari pajak hotel yang turun sebesar 40% dari Rp.65.675.225.000 menjadi 39.204.994.000, maka kontribusi hotel terhadap pajak daerah hanya 27%. Pajak reklame juga mengalami penurunan sebesar 8,45%. Berbeda dengan pajak restoran yang meningkat sebesar 10,48%, pajak hiburan 4,1%, pajak penerangan jalan umum 8,6%, pajak parkir 14,85% dan pajak rumah kost yang meningkat pesat sebesar 1880%. Dapat dianalisis bahwa penurunan pajak hotel juga berpengaruh kepada penurunan pajak reklame yang terjadi karena saling mempengaruhi yang menjadikan kota Bandung sebagai kota wisata potensinya belum optimal pada tahun 2005.

Pada tahun 2006 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 15,11% peningkatan ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak hotel yang realisasinya melebihi target sebesar 103,50%. Begitu juga pajak restoran yang

realisasinya mencapai 101,20%, pajak hiburan 100,33%, pajak penerangan jalan umum 101,64%, pajak parkir 100,10% dan pajak rumah kost 108,62%. Kenaikan pajak tertinggi pada pajak reklame sebesar 139,40% yang faktor pengaruh kenaikan sudah dijelaskan pada laju pertumbuhan pajak reklame diatas.

Pada tahun 2007 terjadi peningkatan pajak daerah sebesar 15,02%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pada pajak hotel yang realisasinya 113,28%, pajak restoran 114,53%, pajak hiburan 122,47% pajak reklame 102,19%, pajak penerangan jalan umum 75,77% pajak parkir 102,59%. Walaupun pajak reklame realisasinya meningkat tetapi laju pertumbuhan pajak reklame mengalami penurunan sebesar 10,29% yang juga mempengaruhi laju pertumbuhan pajak daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 0,9%.

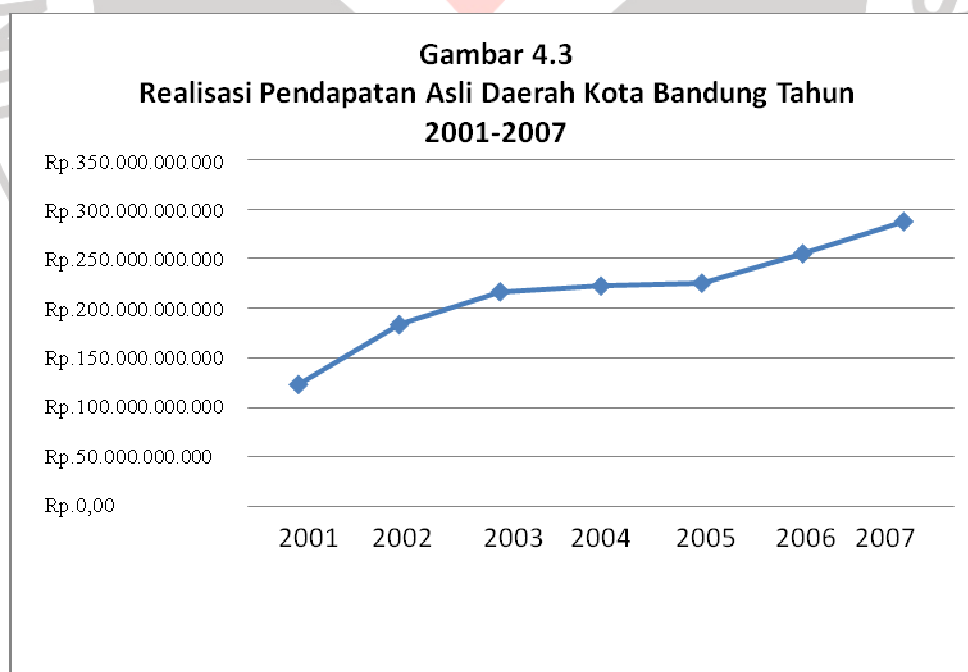
Setelah dianalisis penerimaan pajak daerah kota Bandung pada tahun 2001 hingga tahun 2007 maka disajikan pula data laju pertumbuhan pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2001 hingga 2007 yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 4.6

Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung

No.	Tahun anggaran	Realisasi pendapatan asli daerah (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan %
1	2001	123.984.485.749,23	-	
2	2002	184.008.174.300	60.023.688.600	48,41
3	2003	217.024.342.000	33.016.167.700	17,94
4	2004	222.909.942.000	5.885.600.000	2,71
5	2005	225.696.439.000	2.786.497.000	1,25
6	2006	255.300.008.000	29.603.569.000	13,11
7	2007	287.555.539.000	32.255.531.000	11,22
Jumlah		1.516.478.930.000		- X =13,52%

Sumber : Laporan realisasi pendapatan asli daerah kota Bandung (data diolah)



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah Tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 48,41% dari tahun 2001 dan berturut-turut dari tahun 2003 sampai dengan 2007 mengalami peningkatan sebesar 17,94%, 2,71%, 1,75%, 13,11% dan 11,22%. Kenaikan pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 48,41%, hal ini dipengaruhi dari berbagai peningkatan komponen pendapatan asli daerah terutama yang difokuskan dalam penelitian ini seperti penerimaan pajak reklame yang pada tahun 2002 mengalami kenaikan pajak tertinggi sebesar 121% dan juga penerimaan pajak daerah yang juga kenaikan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 40,18%. Hal ini membuktikan semakin tinggi penerimaan pajak reklame akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

Pada tahun 2001 realisasi penerimaan PAD yang paling besar diperoleh dari sektor pajak daerah sebesar 59,35%. Maka diikuti oleh penerimaan retribusi daerah sebesar 28,62%, lain-lain PAD yang sah 10,82% dan bagian laba BUMD sebesar 1,21% persentasenya terhadap PAD. Tahun 2002 realisasi PAD terhadap targetnya mencapai 93,07% dimana penerimaan pajak daerah merupakan persentase yang paling besar dari komponen PAD lainnya sebesar 56,05%. Selanjutnya diikuti oleh retribusi daerah 26,50%, lain-lain PAD yang sah 16,23% dan bagian laba BUMD sebesar 1,22%.

Pada tahun 2003 realisasi PAD targetnya hanya tercapai 92,72% hal ini terjadi Karena dalam anggaran tahun 2003 bagian laba BUMD belum diterima

sehingga menyebabkan targetnya belum tercapai. Sedangkan persentase paling besar diterima dari pajak daerah sebesar 54,09% selebihnya diterima dari retribusi daerah sebesar 25,1% dan lain-lain PAD yang sah 20,81%. Tahun 2004 realisasi PAD meningkat sebesar 103%. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah, realisasi tertinggi terdapat pada pajak hotel sebesar Rp.65.675.225.000, komponen lain adalah retribusi, dimana nilai tertinggi bersumber pada retribusi pelayanan kesehatan yaitu sebesar Rp.12.646.391.000. pajak dan retribusi menempati nilai tertinggi ke dua dan ke tiga dalam PAD setelah pos bagian laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah.

Tahun 2005 pendapatan asli daerah terealisasi 104% dari total target yang ditetapkan. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah adalah persentase tertinggi sebesar 63,43% selebihnya oleh retribusi daerah 29,38%, lain-lain PAD yang sah 6,05% dan bagian laba BUMD 1,13%. Tahun 2006 realisasi PAD sebesar 106,54% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tertinggi terdapat pada pajak hotel sebesar Rp.43.015.080.000 komponen lain adalah retribusi dimana nilai tertinggi bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yaitu sebesar Rp.17.063.925.000. Tahun 2007 realisasi PAD sebesar 101,98% dari target yang telah ditetapkan. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah, realisasi tertinggi terdapat pada pajak penerangan jalan umum sebesar Rp.52.416.143.000, komponen lain adalah retribusi daerah, dimana nilai tertinggi bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.23.913.118.000.

Dari laju pertumbuhan PAD di atas dapat diketahui bahwa komponen pajak daerah menempati nilai tertinggi dalam PAD dan selebihnya diikuti oleh retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan bagian laba BUMD.

4.2.2 Analisis Potensi Perolehan Pajak Reklame Kota Bandung

Untuk menghitung potensi perolehan pajak reklame yang seharusnya diterima oleh pemerintah kota Bandung dapat kita lihat data dibawah ini :

Tabel 4.7

**Penggolongan/ Jenis Reklame dan Jumlah Reklame Kota Bandung
Tahun 2001- 2007**

Jenis Reklame	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Papan/biilboard	98	8357	3038	5486	5449	6745	5430
Spanduk	69	3336	3037	2346	1346	1073	946
Balon	-	19	33	15	6	8	6
Kendaraan	1	148	91	125	97	190	173
Megatron	-	-	-	-	-	-	-
Bando/Jpo	-	-	-	-	-	18	31
Total	168	11860	6199	7972	6898	8034	6586

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung (data diolah)

Dengan asumsi :

- Rata-rata pemasangan reklame
 1. Papan/biilboard : 1 tahun
 2. Spanduk : 15 hari
 3. Balon Udara : 1 bulan
 4. Kendaraan : 1 tahun
 5. Megatron : 1 tahun
 6. Bando/JPO : 1 tahun
- Rata-rata ukuran reklame
 1. Papan/billboard : $5 m^2 \times 2 m^2 \times 3 m^2$
 2. Spanduk : $4 m^2 \times 0,9 m^2$
 3. Balon udara : $3 m^2 \times 3 m^2 \times 20 m^2$
 4. Kendaraan : $1 m^2 \times 1 m^2$
 5. Bando/JPO : $8 m^2 \times 4 m^2 \times 5 m^2$

Menurut Kesit Bambang Prakosa bahwa potensi pajak reklame yang dapat diraih adalah dengan rumus :

$$\text{Potensi reklame (PPrk)} = R \times S \times D \times Pr$$

Sumber :Kesit Bambang Prakosa (2005,151)

Dalam pengambilan data yang berhubungan dengan potensi reklame, penulis hanya diberikan data jenis dan jumlah reklame, sedangkan ukuran reklame bermacam-macam dan tidak terdapatnya jenis reklame menurut golongannya dan ada yang bersifat tidak dipublikasikan. Peraturan daerah kota Bandung tentang pajak reklame sejak otonomi daerah dimulai dengan peraturan No.18 tahun 2001. Dalam peraturan tersebut cara perhitungan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) belum memakai skor dan bobot, hanya mematok harga yang telah ditentukan. Sedangkan untuk nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) perhitungannya sama dengan perda No.08 tahun 2003 hanya nominal patokan harganya yang lebih kecil. Berikut analisis potensi pajak reklame tahun 2001 hingga 2002:

Tabel 4.8
Analisis ukuran potensi pajak reklame Kota Bandung
Tahun 2001 hingga tahun 2002 (Perda No.18 Tahun 2001 Tentang pajak
reklame)

Jenis	Ukuran
Papan/Billboard	Nilai Strategis Pemasangan reklame (NSPR)
	Nilai Fungsi Ruang : Rp.300.000 Nilai Fungsi jalan : Rp.300.000 Nilai Sudut Pandang :Rp.150.000 Jumlah :Rp.750.000
	Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
	Ukuran Reklame : (4 x 2) x Rp.250.000 = Rp.2.000.000 Ketinggian : 10% x Rp.2000.000 = Rp. 200.000 Jumlah =Rp. 2.200.000
	Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 2.950.000
	Spanduk
Nilai Fungsi Ruang : Rp.300.000 Nilai Fungsi jalan : Rp.300.000 Nilai Sudut Pandang :Rp.150.000 Jumlah :Rp.750.000	
Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)	
Ukuran Reklame : (4 x 0,9) x Rp.2.500 = Rp.9.000 Ketinggian : - x - = Rp. - Jumlah = Rp. 9.000	
Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 759.000	
Balon	
	Nilai Fungsi Ruang : Rp.300.000 Nilai Fungsi jalan : Rp.300.000 Nilai Sudut Pandang :Rp.150.000 Jumlah : Rp.750.000
	Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
	Ukuran Reklame : (3 x 3) x Rp.750.000 = Rp.6.750.000 Ketinggian : 10% x Rp.6.750.000 = Rp. 675.000 Jumlah = Rp.7.425.000
	Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 8.175.000
	Kendaraan
Nilai Fungsi Ruang : Rp.300.000 Nilai Fungsi jalan : Rp.300.000	

Nilai Sudut Pandang :Rp.150.000 Jumlah :Rp.750.000
Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
Ukuran Reklame :(1 x 1) x Rp.350.000 = Rp.350.000 Ketinggian : - x Rp. - = Rp. Jumlah = Rp.350.000
Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 1100.000

Tabel 4.9

Potensi Pajak reklame Kota Bandung tahun 2001

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah
Papan/billboard	98	Rp.2.950.000	1 tahun	25%	Rp 72.275.000
Spanduk	69	Rp.759.000	1 bulan	25%	Rp 13.092.750
Balon Udara	-	Rp.-	1 bulan	25%	Rp -
Kendaraan	1	Rp.1.100.000	1 tahun	25%	Rp 275.000
Total Potensi					Rp 85.642.750

Sumber : Data diolah

Dilihat pada tabel 2001 bahwa potensi penerimaan pajak reklame hanya Rp 85.642.750 dan sangat berbeda dengan realisasinya mencapai Rp 3.600.800.167. Hal ini dikarenakan data yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2001 belum disempurnakan atau belum dilengkapi. Hal ini yang menyebabkan data terlihat rancu dengan tahun-tahun lainnya.

Tabel 4.10

Potensi Pajak reklame Kota Bandung tahun 2002

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah
Papan/billboard	8357	Rp.2.950.000	1 tahun	25%	Rp.6.163.287.500
Spanduk	3336	Rp.759.000	1 bulan	25%	Rp.633.006.000
Balon Udara	19	Rp.8.175.000	1 bulan	25%	Rp.38.831.250
Kendaraan	148	Rp.1.100.000	1 tahun	25%	Rp.162.800.000
Total Potensi					Rp.6.997.924.750

Sumber : Data diolah

Pada tahun 2002 potensi penerimaan pajak reklame mencapai Rp 6.997.924.750. Pada tahun 2002 banyaknya reklame sudah terdata dengan baik khususnya pada reklame papan. Walaupun begitu dilihat dari potensinya masih banyak reklame yang belum terdata seperti reklame yang illegal dan jenis reklame lainnya selain yang ada dalam data Dispenda kota Bandung tersebut.

Selanjutnya untuk mengukur potensi penerimaan pajak reklame maka penulis mengikuti peraturan daerah N0.08 Tahun 2003 tentang pajak reklame yang dimulai pada tahun 2003. Adapun untuk mengukur ukuran yaitu yang termasuk nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) ditambah nilai jual objek reklame (NJOR) penulis menggunakan asumsi dengan ukuran rata-rata terkecil yang ukurannya diperoleh dari pegawai Dispenda wakil kordinator pajak reklame pak Cecep Sukaryata dan pegawai di bagian umum/server pak Mamat. Berikut data perhitungannya :

Tabel 4.11

**Analisis Ukuran Potensi Pajak Reklame Kota Bandung
Tahun 2003 Hingga Tahun 2007 (Perda No.08. tahun 2003)**

Jenis	Ukuran
Papan/Billboard	Nilai strategis Pemasangan reklame (NSPR)
	Nilai Fungsi Ruang : $10 \times \text{Bobot } 60\% = 6$ Nilai Fungsi jalan : $10 \times \text{Bobot } 15\% = 1,5$ Nilai Sudut Pandang : $4 \times \text{Bobot } 25\% = 1$ Jumlah : $8,5 \times \text{Rp.}1000.000 = \text{Rp.}8.500.000$
	Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
	Ukuran Reklame : $(5 \times 2) \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp.}10.000.000$ Ketinggian : $3 \text{ m} \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp. } 300.000$ Jumlah = $\text{Rp. } 10.300.000$
	Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp.18.800.000
Spanduk	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)
	Nilai Fungsi Ruang : $10 \times \text{Bobot } 60\% = 6$

	Nilai Fungsi jalan : $10 \times \text{Bobot } 15\% = 1,5$ Nilai Sudut Pandang : $4 \times \text{Bobot } 25\% = 1$ Jumlah : $8,5 \times \text{Rp.}25.000 = \text{Rp.}212.500$
	Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
	Ukuran Reklame : $(4 \times 0,9) \times \text{Rp.}3.000 = \text{Rp.}10.800$ Ketinggian : - x - = Rp. - Jumlah = Rp. 10.800
	Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp.223.300
Balon	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)
	Nilai Fungsi Ruang : $10 \times \text{Bobot } 60\% = 6$ Nilai Fungsi jalan : $10 \times \text{Bobot } 15\% = 1,5$ Nilai Sudut Pandang : $4 \times \text{Bobot } 25\% = 1$ Jumlah : $8,5 \times \text{Rp.}500.000 = \text{Rp.}4.250.000$
	Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
	Ukuran Reklame : $1 \text{ bln} \times \text{Rp.}3.000.000 = \text{Rp.}3.000.000$ Ketinggian : $20 \text{ m} \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp.}2.000.000$ Jumlah = Rp. 5.000.000
	Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp.9.250.000
	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)
Kendaraan	Nilai Fungsi Ruang : $10 \times \text{Bobot } 60\% = 6$ Nilai Fungsi jalan : $10 \times \text{Bobot } 15\% = 1,5$ Nilai Sudut Pandang : $4 \times \text{Bobot } 25\% = 1$ Jumlah : $8,5 \times \text{Rp.}200.000 = \text{Rp.}1.700.000$
	Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
	Ukuran Reklame : $(1 \times 1) \times \text{Rp.}3.500.000 = \text{Rp.}3.500.000$ Ketinggian : - x Rp. - = Rp. - Jumlah = Rp.3.500.000
	Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp.5.200.000
	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)
	Nilai Fungsi Ruang : $10 \times \text{Bobot } 60\% = 6$ Nilai Fungsi jalan : $10 \times \text{Bobot } 15\% = 1,5$ Nilai Sudut Pandang : $4 \times \text{Bobot } 25\% = 1$ Jumlah : $8,5 \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp.}8.500.000$
Bando/JPO	Nilai Jual Objek reklame (NJOR)
	Ukuran Reklame : $(8 \times 4) \times \text{Rp.}2.000.000 = \text{Rp.}64.000.000$ Ketinggian : $5 \text{ m} \times \text{Rp.}500.000 = \text{Rp.}500.000$ Jumlah = Rp.64.500.000
	Nilai Sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp.73.000.000

Sumber : Data diolah

Tabel 4.12
Potensi Pajak Reklame Kota Bandung tahun 2003

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah
Papan/billboard	3038	Rp.18.800.000	1 tahun	25%	Rp.14.278.600.000
Spanduk	3037	Rp.223.300	15*	25%	Rp.2.543.107.875
Balon Udara	33	Rp.9.250.000	1 bulan	25%	Rp. Rp.76.312.500
Kendaraan	91	Rp.5.200.000	1 tahun	25%	Rp.118.300.000
Total Potensi					Rp. 17.016.320.380

Sumber : Data diolah

Keterangan : *) : diasumsikan pemasangan untuk 15 hari

Pada Tahun 2003 dilihat dari potensinya sebesar Rp 17.016.320.380 berbeda dengan realisasinya dimana penerimaan pajak reklame hanya sebesar Rp 10.302 704.000. Jika diukur dari tingkat efektivitasnya maka potensi pajak reklame yang baru tergali hanya 60,55% dengan kriteria kurang efektif.

Tabel 4.13
Potensi Pajak reklame Kota Bandung tahun 2004

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah
Papan/billboard	5486	Rp.18.800.000	1 tahun	25%	Rp.25.784.200.000
Spanduk	2346	Rp.223.300	15*	25%	Rp.1.964.481.750
Balon Udara	15	Rp.9250.000	1 bulan	25%	Rp. 34.687.500
Kendaraan	125	Rp.5.200.000	1 tahun	25%	Rp.162.500.000
Total Potensi					Rp. 27.945.869.250

Sumber : Data diolah

Keterangan : *) : diasumsikan pemasangan untuk 15 hari

Pada Tahun 2004 potensi yang dapat diraih pemerintah kota Bandung adalah sebesar Rp 27.945.869.250 sedangkan realisasinya sebesar Rp 16.211.576.000. Jika diukur tingkat efektivitasnya maka potensi yang baru tergali dari pajak reklame sebesar 58,01% dengan kriteria tidak efektif.

Tabel 4.14
Potensi Pajak reklame Kota Bandung tahun 2005

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah
Papan/billboard	5449	Rp.18.800.000	1 tahun	25%	Rp.25.610.300.000
Spanduk	1346	Rp.223.300	15*	25%	Rp.1.127.106.750
Balon Udara	6	Rp.9.250.000	1 bulan	25%	Rp. 13.875.000
Kendaraan	97	Rp.5.200.000	1 tahun	25%	Rp.126.100.000
Total Potensi					Rp. 26.877.381.750

Sumber : Data diolah

Keterangan : *) : diasumsikan pemasangan untuk 15 hari

Pada tahun 2005 potensi yang dapat diraih kota Bandung adalah sebesar Rp 26.877.381.750 sedangkan realisasinya sebesar Rp 14.841.996.000. Jika diukur tingkat efektivitas dari potensi pajak reklame tahun 2005 hanya sebesar 55,22% dengan kriteria tidak efektif.

Tabel 4.15
Potensi Pajak reklame Kota Bandung tahun 2006

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah
Papan/billboard	6745	Rp.18.800.000	1 tahun	25%	Rp.31.701.500.000
Spanduk	1073	Rp.223.300	15*	25%	Rp.898.503.375
Balon Udara	8	Rp.9.250.000	1 bulan	25%	Rp. 18.500.000
Kendaraan	190	Rp.5.200.000	1 tahun	25%	Rp.247.000.000
Bando/JPO	18	Rp.73.000.000	1 tahun	25%	Rp. 328.500.000
Total Potensi					Rp. 33.194.003.380

Sumber : Data diolah

Keterangan : *) : diasumsikan pemasangan untuk 15 hari

Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2006 merupakan tahun tertinggi efektivitasnya dimana realisasinya Rp 26.103.432.000 dengan efektivitasnya 139,40%. Jika diukur melalui potensi reklame yang mencapai Rp 33.194.003.380 masih berada kategori kurang efektif (78,64%) tetapi mengalami peningkatan yang sebelumnya berada pada kategori tidak efektif.

Tabel 4.16
Potensi Pajak reklame Kota Bandung tahun 2007

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah
Papan/billboard	5430	Rp.18.800.000	1 tahun	25%	Rp.25.521.000.000
Spanduk	946	Rp.223.300	15*	25%	Rp.792.156.750
Balon Udara	6	Rp.9.250.000	1 bulan	25%	Rp. 13.875.000
Kendaraan	173	Rp.5.200.000	1 tahun	25%	Rp.224.900.000
Bando/JPO	31	Rp.73.000.000	1 tahun	25%	Rp. 565.750.000
Total Potensi					Rp. 27.117.681.750

Sumber : Data diolah

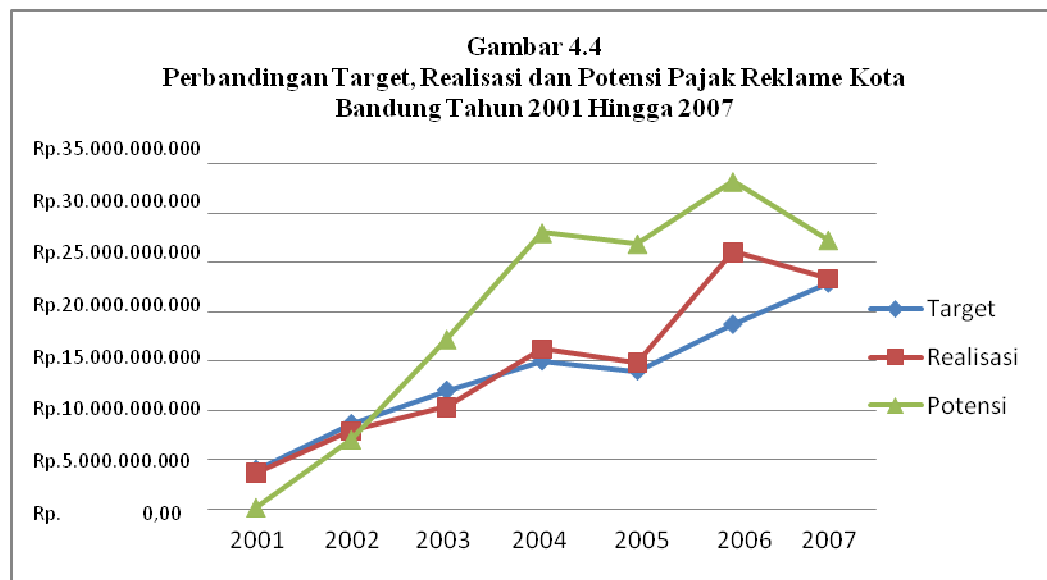
Pada tahun 2007 potensi pajak reklame yang dapat diraih adalah sebesar Rp 27.117.681.750 sedangkan realisasinya sebesar Rp 23.915.170.000. Jika diukur tingkat efektivitasnya penerimaan pajak reklame tergali sebesar 88,19% dengan kategori cukup efektif yang mengalami peningkatan dimana tahun sebelumnya berada pada kategori kurang efektif.

Secara jelas akan terlihat perbedaan antara penerimaan pajak reklame, potensi pajak reklame dan juga target dari perolehan pajak reklame di kota Bandung untuk tahun 2001 hingga tahun 2007 pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17
Perbandingan Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2001 Hingga Tahun 2007

Tahun	Target	Realisasi	Potensi
2001	3.950.000.000	3.600.800.167	Rp.85.642.750
2002	8.600.000.000	7.901.111.760	Rp.6.997.924.750
2003	12.000.000.000	10.302.704.000	Rp.17.016.320.380
2004	15.000.000.000	16.211.576.000	Rp.27.945.869.250
2005	14.000.000.000	14.841.996.000	Rp.26.877.381.750
2006	18.725.960.000	26.103.432.000	Rp.33.194.003.380
2007	22.915.170.000	23.416.691.000	Rp.27.117.681.750

Sumber : Data diolah



Analisis yang dapat diperoleh dari data perbandingan target, realisasi dan potensi penerimaan reklame di atas adalah adanya perbedaan antara potensi reklame dengan realisasinya. Pada tahun 2001 hingga tahun 2002 potensi yang ada lebih kecil dari target dan realisasinya. Hal ini dikarenakan pendataan banyaknya reklame belum lengkap dan peraturan daerah No.18 tahun 2001 yang nilai tarif reklamennya masih kecil dibandingkan peraturan daerah No.08 tahun 2003.

Pada tahun 2003 hingga tahun 2007 dapat dilihat bahwa potensi pajak reklame jauh lebih besar dibandingkan target dan realisasinya. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan daerah No.08 tahun 2003 kota Bandung yang perhitungan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) yang menggunakan bobot dan skor dalam menentukan Nilai Fungsi Ruang (NFR), Nilai Fungsi jalan (NFJ) dan Nilai Sudut Pandang (NSP). Berbeda dengan Perda tahun No.18 kota Bandung tahun 2001 yang perhitungan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) masih mematok

harga. Begitu juga untuk perhitungan nilai jual objek reklame (NJOR) dimana dalam peraturan daerah No.08 tahun 2003 tarif reklame jauh lebih mahal dibandingkan Perda No.18 tahun 2001. Seperti reklame papan/billboard dalam perda No.18 tahun 2001 hanya mematok tarif Rp.375.000/m² untuk lahan milik pemerintah dan Rp.300.000/m² untuk lahan milik pribadi, sedangkan dalam Perda No.08 tahun 2003 tarif reklame papan bervariasi dari ukuran lebih kecil (<)10 m² Rp 750.000 untuk setiap satu meternya , selanjutnya ukuran antara 10-50 m² Rp 1.000.000 untuk setiap meternya dan ukuran lebih besar (>) 50 m² Rp 1.250.000 untuk setiap meternya untuk semua lahan.

Dengan melihat dan membandingkan antara target, realisasi serta potensi dari pajak reklame, maka kinerja pemerintah kota Bandung harus ditingkatkan lagi dalam mengelola penerimaan pajak reklame. Tetapi juga harus diingat bahwa potensi pada tabel dan gambar adalah dihitung dengan rata-rata dari tiap jenis reklame dan akan sangat mungkin penerimaan potensi diatas angkanya lebih besar lagi mengingat banyaknya reklame yang belum terdata/illegal serta tambahan tarif pajak 25% bagi reklame rokok atau produk minuman beralkohol. Apabila pemerintah dapat mencapai penerimaan pajak reklame menurut potensi yang sebenarnya maka nilai tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Bandung.

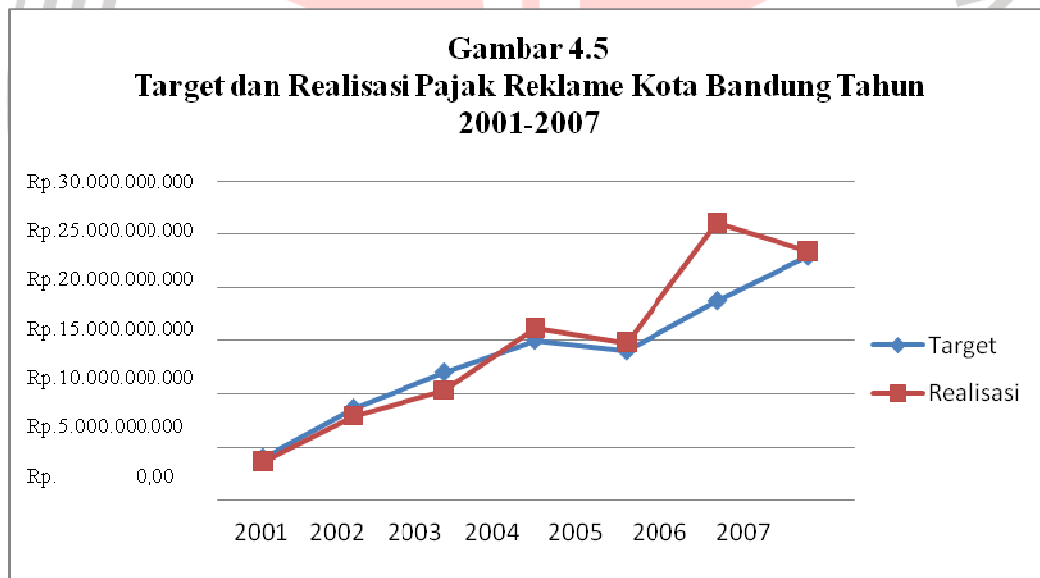
4.2.3 Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Pada Dipenda Kota Bandung Tahun 2001 hingga Tahun 2007

Untuk dapat menghitung efektivitas pajak reklame di kota Bandung berdasarkan target dan realisasi maka disusun tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 4.18
Efektivitas Pajak Reklame Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2001	3.950.000.000	3.600.800.167	91,16%	Efektif
2002	8.600.000.000	7.901.111.760	91,87%	Efektif
2003	12.000.000.000	10.302.704.000	85,86%	Cukup efektif
2004	15.000.000.000	16.211.576.000	108%	Sangat efektif
2005	14.000.000.000	14.841.996.000	106,01%	Sangat efektif
2006	18.725.960.000	26.103.432.000	139,40%	Sangat efektif
2007	22.915.170.000	23.416.691.000	102,19%	Sangat efektif
Rata-rata			103,93	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan daerah kota Bandung (data diolah)



Berikut ini juga disajikan tabel tingkat efektivitas berdasarkan potensi dan tingkat efektivitas berdasarkan target untuk pajak reklame Kota Bandung tahun 2001 hingga 2007:

Tabel 4.19

Perbandingan Efektivitas Pajak Reklame dan Efektivitas Potensi Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2001 Hingga Tahun 2007

Tahun	Pajak Reklame		Potensi Pajak Reklame	
	Efektivitas (%)	Standar/Kriteria	Efektivitas (%)	Standar/Kriteria
2001	91,16%	Efektif	4204%	Sangat efektif
2002	91,87%	Efektif	112,90%	Sangat efektif
2003	85,86%	Cukup efektif	60,55%	Kurang efektif
2004	108%	Sangat efektif	58,01%	Tidak efektif
2005	106,01%	Sangat efektif	55,22%	Tidak efektif
2006	139,40%	Sangat efektif	78,64%	Kurang efektif
2007	102,19%	Sangat efektif	88,19%	Cukup efektif

Sumber : Data diolah

Dilihat dari tabel 4.5 dan 4.4 di atas, target dan realisasi penerimaan pajak reklame selama tujuh tahun mengalami peningkatan. Namun selama empat tahun sejak tahun 2001 hingga tahun 2003 penerimaan pajak reklame masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2001 pemerintah menargetkan Rp 3.950.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 3.600.800.167. walaupun tidak tercapai target hanya 91,16 tetapi sudah termasuk kriteria efektif.

Pada tahun 2002 pemerintah menargetkan penerimaan pajak reklame sebesar Rp 8.600.000.000 atau naik sebesar Rp 4.650.000.000 atau 117,72% dari tahun 2001, yang tercapai realisasinya Rp 7.901.111.760 dan memenuhi target sebesar 91,87% dengan kriteria efektif. Walaupun targetnya belum mencapai 100% tetapi laju pertumbuhan pajak reklame merupakan yang tertinggi sebesar 121%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah reklame yang sangat banyak dengan total reklame 11.860 buah reklame. Diantaranya reklame papan sebanyak 8357 buah,

spanduk 3336 buah, balon 19 buah, kendaraan 148 buah. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2001 yang data di Dipenda hanya terdapat papan sebanyak 98 buah, spanduk 69 buah dan kendaraan 1 buah.

Selanjutnya tahun 2003 pemerintah menargetkan penerimaan pajak reklame sebesar Rp 12.000.000.000 atau lebih besar Rp 3.400.000.000 atau 39,53% dari tahun 2002. Ternyata realisasinya hanya Rp 10.302.704.000 dan target yang tercapai hanya sebesar 85,86% atau turun dari target tahun 2002 sebesar 6,31% dengan kriteria cukup efektif. Hal ini dikarenakan turunnya jumlah reklame yang pada tahun 2002 jumlahnya 11860 buah menjadi 6199 buah. Penurunan yang paling tajam adalah pada jenis reklame papan/billboard dimana pada tahun 2002 berjumlah 8357 buah menjadi 3038 buah. Penurunan jenis papan reklame billboard ini disebabkan tingginya tarif pajak reklame akibat perubahan dari Perda No.18 tahun 2001 ke Perda No.08 tahun 2003 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Perda No.18 Tahun 2001 harga dasar ukuran reklame papan/billboard mematok tarif Rp 375.000/m² untuk lahan pemerintah, berbeda dengan Perda No.08 Tahun 2003 kota Bandung tentang pajak reklame yang tarifnya meningkat menjadi Rp 750.000/m² untuk ukuran reklame papan/billboard lebih kecil (<) 10 m² dan tarifnya lebih tinggi lagi apabila ukuran reklame lebih besar.

Berikutnya pada tahun 2004 pemerintah menargetkan penerimaan pajak reklame sebesar Rp 15.000.000.000 atau naik sebesar Rp 3.000.000.000 atau 25%. Realisasi yang dicapai melebihi target yaitu sebesar Rp 16.211.576.000 atau 108% dengan kriteria sangat efektif. Penerimaan ini meningkat 22,44% dari

realisasi tahun 2003. Hal ini dipengaruhi oleh Bandung sebagai kota wisata yang dicanangkan sejak tahun 2004. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah reklame dari tahun 2003. Pada tahun 2003 jumlah keseluruhan reklame sebanyak 6199 buah, sedangkan tahun 2004 meningkat jumlahnya sebanyak 7972. Adapun jenis reklame papan/billboard yang paling mendominasi jumlah reklame sebanyak 5486 buah sisanya jenis reklame spanduk 2346 buah, balon 15 buah dan kendaraan 125 buah. Peningkatan ini juga berdampak kepada pajak daerah dengan meningkat sebesar 13,77% dan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 2,71%.

Pada tahun 2005 pemerintah hanya menargetkan Rp 14.000.000.000 atau turun sebesar Rp 1000.000.000. Hasil realisasinya tercapai Rp 14.841.996.000 atau tercapai target sebesar 106,01% dengan kriteria sangat efektif. Walaupun realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan tetapi target yang ditetapkan pemerintah mengalami penurunan dari target tahun 2004 sebesar 6,66% atau lebih rendah Rp 1000.000.000. hal ini dipengaruhi oleh jumlah reklame yang semakin berkurang dibandingkan tahun 2004. Adapun di tahun 2004 jumlahnya 7972 buah reklame sedangkan di tahun 2005 jumlahnya turun menjadi 6898 buah. Dengan perincian reklame papan 5449 buah, spanduk 1346 buah, balon udara 6 buah dan reklame kendaraan 97 buah. Penerimaan pajak reklame juga diikuti oleh penerimaan pajak hotel yang turun sebesar 40%. Hal ini juga berhubungan dengan potensi wisata di kota Bandung yang masih belum optimal dimana pada tahun 2004 Bandung dicanangkan sebagai kota wisata.

Selanjutnya pada tahun 2006 pemerintah menaikkan targetnya menjadi Rp 18.725.960.000 atau naik sebesar Rp 4.841.996.000 atau 34,58% lebih tinggi dari

tahun 2005. Hasilnya tercapai realisasinya Rp 26.103.432.000 atau naik cukup tinggi sebesar 139,40 % atau meningkat 33,39% dari tahun 2005 dengan kriteria sangat efektif. faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut antara lain meningkatnya jumlah reklame sebesar 8034 buah dari tahun 2005 yang hanya berjumlah 6898 buah. Begitu juga jenis reklame yang paling banyak adalah reklame papan sebanyak 6745 buah dimana reklame papan/billboard merupakan sumber penerimaan terbesar dari pajak reklame. Selanjutnya spanduk yang berjumlah 1073 buah, balon udara 8 buah, kendaraan 190 buah dan bando (jembatan penyebrangan orang) 18 buah. Hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajaknya yang mentaati peraturan tentang pajak reklame dalam membayar pajak reklame tersebut. Selain itu sejak ditetapkannya keputusan dalam negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana pemisahan rekening untuk masing-masing jenis reklame mulai dimasukkan dalam anggaran yang sebelumnya rekening untuk pajak reklame disatukan.

Pada tahun 2007 pemerintah daerah kota Bandung menargetkan Rp 22.915.170.000 atau meningkat sebesar Rp 4.189.210.000 atau 22,37% dari target tahun sebelumnya. Maka dicapai realisasinya sebesar Rp 23.416.691.000 atau 102,19% dengan kriteria sangat efektif. Walaupun pemerintah sudah dapat mencapai target dan realisasi sangat efektif pada tahun 2007 tetapi Kriteria/rasio persentasenya mengalami penurunan sebesar 37,21%. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya disebabkan oleh banyaknya tunggakan pajak reklame pada tahun tersebut yang mencapai Rp.4.400.000.000.

Selain itu yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak reklame pada tahun 2007 karena panitia khusus peraturan daerah reklame DPRD kota Bandung menetapkan enam titik sebagai kawasan bebas reklame. Kawasan tersebut antara lain Jln. Ir. H. Djuanda, Jl. Junjuran, Jl. Asia Afrika, Jl. Braga, Jl. Pajajaran, dan Jln. Cipaganti. Selain itu, Pansus juga menetapkan kawasan pendidikan, tempat ibadah, perumahan, taman kota, rumah sakit, dan kompleks militer sebagai kawasan bebas reklame. Dengan ditetapkannya kawasan bebas reklame tersebut maka Kepala dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung, Yossi Irianto (10 maret 2007) mengungkapkan, “ditetapkannya 6 kawasan tersebut sebagai kawasan bebas reklame maka Pemerintah kota Bandung berpotensi kehilangan sekitar Rp 5,4 miliar dari pajak reklame” Selain itu penurunan terjadi akibat sebanyak 3.000 reklame di Kota Bandung tidak dilengkapi izin atau masa izinnnya sudah habis. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah karena tidak ada data yang akurat tentang lokasi papan reklame tersebut. (Kompas 6 Januari 2007).

Begitu juga dilihat pada tabel perbandingan penerimaan pajak reklame dengan potensi pajak reklame dari tahun 2001 hingga tahun 2007 bahwa pada tahun 2001 hingga tahun 2002 potensi yang diperhitungkan melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 4204% dan 112,90%. Hal ini dipengaruhi karena pada tahun 2001 jumlah data reklame belum lengkap yang didata oleh dinas pendapatan daerah sehingga untuk perhitungan potensi belum terperinci. Sedangkan untuk tahun 2002 merupakan kinerja yang baik dari pemerintah kota Bandung karena dilihat dari efektivitas potensinya kinerjanya sangat baik, begitu juga untuk target dari pemerintah sendiri yang mencapai 91,87% kinerjanya dapat

dikatakan efektif. Disamping itu yang mempengaruhi tingkat efektivitas potensi reklame yang tinggi juga dipengaruhi oleh peraturan daerah No.18 tahun 2001 yang perhitungan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) dan nilai jual objek reklame (NJOR) lebih kecil dari peraturan daerah No.08 tahun 2003.

Sedangkan pada tahun 2003 hingga tahun 2007 rata-rata tingkat efektivitas potensi pajak reklame sebesar 68,12% atau pada kategori kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan daerah kota Bandung No.08 tahun 2003 tentang pajak reklame yang perhitungan NSPR sudah menggunakan bobot dan skor untuk tiap jenis reklame dan NJOR yang tarif per meter untuk tiap jenis reklame lebih besar dari perda No.18 tahun 2001 sehingga jika dihitung potensi penerimaannya seharusnya realisasinya lebih besar dari yang sebenarnya.

Dinas yang terkait dengan reklame antara lain adalah dinas pendapatan daerah, dinas pertamanan dan yang baru dalam mengelola perijinan reklame adalah badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMPPT) sejak agustus 2008. Walaupun memiliki data tentang reklame tetapi data yang ada belum tentu sama, hal ini yang menjadikan perbedaan jumlah reklame antara dinas satu dengan dinas lainnya. Berikut perbandingan data jumlah reklame yang ada pada Dipenda dengan Dinas pertamanan :

Tabel 4.20

Banyaknya Reklame Kota Bandung

Jenis reklame	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Papan/biilboard	98	8357	3038	5486	5449	6745	5430
Spanduk	69	3336	3037	2346	1346	1073	946
Balon	-	19	33	15	6	8	6
Kendaraan	1	148	91	125	97	190	173
Megatron	-	-	-	-	-	-	-

Bando/Jpo	-	-	-	-	-	18	31
Total	168	11860	6199	7972	6898	8034	6586

Sumber : Dinas pendapatan daerah kota Bandung 2001-2007

Sedangkan data yang ada pada dinas pertamanan tentang jumlah reklame adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Banyaknya reklame di kota Bandung

Jenis reklame	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Papan	3121	3985	3038	5486	5449	6745	5430
Spanduk	13195	8316	10817	12383	14.858	18231	22252
Umbul-umbul	-	-	11.508	15.592	24.769	27.382	34.775
Bandir	-	-	3.121	6607	11.706	8.359	27.427
Banner	-	-	599	779	967	1903	3427
Balon udara	11	-	31	26	20	283	23
Baliho	35	-	114	23	1	-	-
Poster	11.070	2.550	4.148	2.263	1.100	-	-
Tempelan	-	-	100	-	2	-	-
Timplat	740	535	232	20	-	-	-
Flagchain	-	-	-	200	-	-	-
Total	28.172	15.386	33.707	43.379	58.872	62.903	93.334

Sumber : Dinas Pertamanan kota Bandung

Bervariasinya jumlah penerimaan pajak reklame sejalan dengan banyaknya jumlah reklame yang dipasang di titik-titik reklame di kota Bandung. Adanya perbedaan jumlah reklame antara Dispenda dengan dinas pertamanan akan mengakibatkan ketidaksesuaian data banyaknya reklame. Perbedaan tersebut harus diminimalkan karena dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Walaupun Dipenda mempunyai otoritas dalam memungut pajak reklame tetapi jika data yang ada terdapat perbedaan yang besar dengan dinas yang terkait seperti dinas pertamanan dan badan penanaman modal dan pelayanan perijinan

terpadu (BMPPT) akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame tersebut, khususnya jika dilihat tingkat efektivitasnya dimana potensi pajak reklame masih sangat besar yang belum tergali.

Selain itu sebanyak 3.000 reklame di Kota Bandung tidak dilengkapi izin atau masa izinnya sudah habis. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mengaku sulit menertibkannya karena tidak ada data akurat tentang lokasi papan reklame tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunggu data dari Tim Perizinan Penyelenggaraan Reklame (TP2R), penanggung jawab masalah reklame. Akibat banyaknya pelanggaran reklame, potensi pajak reklame yang tidak dibayar mencapai Rp 10 miliar. (Kompas 6 Januari 2007). Ketua DPRD Kota Bandung Husni Muttaqin (Kompas, 6 Januari 2007) mengatakan keberadaan reklame tanpa izin mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan Pemkot Bandung.

Begitu juga upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame jangan mengabaikan K3 (Kebersihan, ketertiban, keindahan) supaya sesuai dengan visi kota Bandung tetap terjaga yaitu "Genah, Merenah, Tumaninah". Untuk itu, harus dilakukan pembenahan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya ruang publik.

Sejak disahkannya peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka pajak reklame sekarang sudah mulai menetapkan target dan realisasinya masing-masing tiap jenis reklame. Pemisahan rekening untuk masing-masing reklame mulai dianggarkan pada tahun 2007 oleh dinas pendapatan daerah kota Bandung. Berikut data target dan realisasi tiap jenis reklame tahun 2007:

Tabel 4.22

Target dan Realisasi Pajak reklame kota Bandung tahun 2007

Ket	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	kriteria
Reklame papan	21.573.050.000	18.379.862.984	85,198%	Cukup efektif
Reklame spanduk	448.655.653	1.415.113.076	315,412%	Sangat efektif
Reklame kendaraan	600.590.511	748.950.875	124,702%	Sangat efektif
Reklame balon udara	292.873.795	19.950.000	6,812%	Tidak efektif
Reklame bando	-	2.829.252.500	-	-
Reklame timplat	-	51.300.000	-	-

Sumber : Dinas Pendapatan daerah kota Bandung

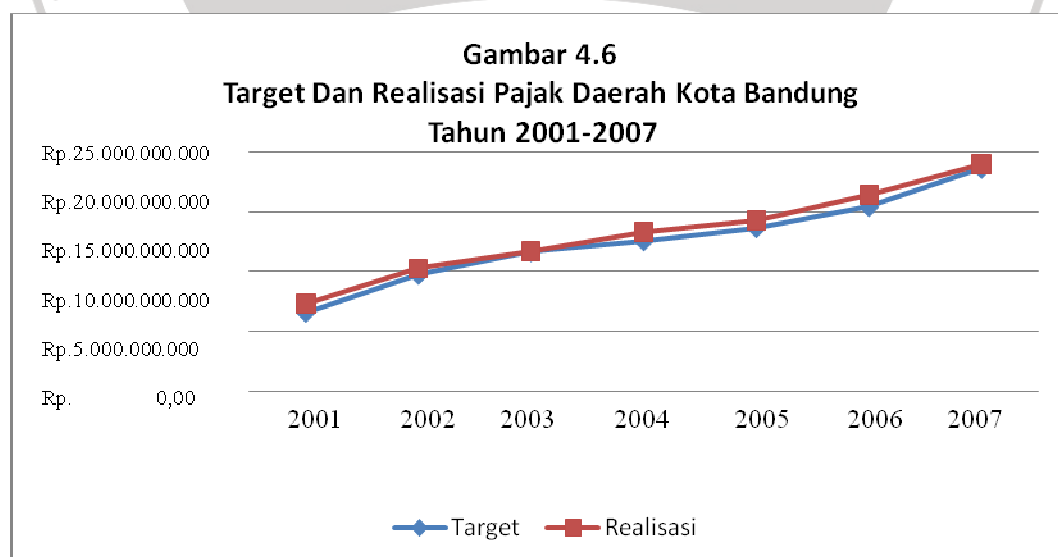
4.2.4 Analisis Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah “penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kemandirian daerah. Berikut tabel target dan realisasi setiap sumber pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2001-2007 untuk menilai tingkat efektivitasnya:

Tabel 4.23
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2001	66.450.000.000	73.583.061.471,10	110,73	Sangat efektif
2002	98.100.000.000	103.153.173.908	105,15	Sangat efektif
2003	117.000.000.000	117.392.949.000	100,34	Sangat efektif
2004	126.072.000.000	133.554.985.000	106	Sangat efektif
2005	137.050.000.000	143.107.824.000	104,42	Sangat efektif
2006	154.728.981.000	164.781.409.646	106,50	Sangat Efektif
2007	186.625.928.000	190.474.951.000	102,06	Sangat efektif
Rata-rata	886.026.909.000	968.757.418.400	106,86	Sangat efektif

Sumber : Dinas pendapatan daerah Kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)



Dilihat dari tabel tingkat efektivitas pajak daerah di atas maka efektivitas pajak daerah yang tertinggi selama tahun 2001 hingga 2007 adalah pada tahun 2006 sebesar 119,31% dengan kriteria sangat efektif. Adapun penerimaan pajak yang paling besar adalah dari pajak hotel dengan kontribusinya 21,45% sedangkan pajak reklame hanya sebesar 5,53%. Sedangkan efektivitas paling rendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 100,34% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2001 efektivitas pajak daerah sebesar 110,73%. Ini merupakan pencapaian tertinggi dan awal yang baik bagi pemerintah kota Bandung dalam mengelola pajak daerahnya karena kinerja pemerintah dikatakan sangat efektif. Pajak hotel dan restoran merupakan yang paling besar sumber penerimaannya dimana efektivitasnya mencapai 106,59% sedangkan pajak reklame efektivitasnya mencapai 91,16%.

Pada tahun 2002 efektivitas pajak daerah sebesar 105,15 % dimana ukuran kinerjanya dikatakan sangat efektif. Pajak hotel dan restoran merupakan sumber penerimaan yang paling besar dimana efektivitasnya 103,55%. Jika dilihat tingkat tingkat efektivitasnya pajak hiburan merupakan yang tertinggi sebesar 112,03% sedangkan efektivitas yang paling rendah adalah pajak reklame yang efektivitasnya hanya 91,87%. Pada tahun 2003 efektivitas pajak daerah sebesar 100,34%. Penurunan efektivitas ini dipengaruhi oleh penurunan komponen pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran efektivitasnya 102,35%, pajak hiburan 104,69%, pajak reklame 85,86% dan pajak penerangan jalan umum sebesar 103,26%. Namun dilihat dari ukuran kinerjanya bahwa pada tahun 2003 kinerja pemerintah dalam mengelola pajak daerah sangat efektif.

Pada tahun 2004 efektivitas pajak daerah kota Bandung sebesar 106% dimana terjadi kenaikan dari tahun 2003. Hal ini dipengaruhi dari pemisahan rekening anggaran pajak hotel dan restoran menjadi pajak hotel dan pajak restoran dimana pajak hotel tercapai 193% dan pajak restoran 104%. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh pajak hiburan 107%, pajak reklame 108%, pajak penerangan jalan umum 110% dan pajak parkir 95%, dan pajak rumah kost 1%. Dengan ini kinerja pemerintah dalam mengelola pajak daerah sangat efektif pada tahun 2004.

Pada tahun 2005 penerimaan pajak daerah kota Bandung sebesar Rp 143.107.824.000 dimana tingkat efektivitasnya mencapai 104,42%. Walaupun tingkat efektivitasnya turun dari tahun 2004 tetapi penerimaannya naik Rp 10.000.000.000 dari tahun 2004. Hal ini dipengaruhi oleh komponen pajak daerah yang juga melebihi target dan hanya pajak rumah kost yang efektivitasnya hanya 57,76%. Selebihnya pajak hotel 103,17%, pajak restoran 106,14%, pajak hiburan 100,36%, pajak reklame 106,01%, pajak penerangan jalan umum 105,14% pajak parkir 101,08%. Dapat dikatakan pada tahun 2005 kinerja pemerintah dalam mengelola pajak daerahnya sangat efektif.

Pada tahun 2006 efektivitas pajak daerah kota Bandung mencapai 106,50%. Ini merupakan pencapaian yang tertinggi kedua setelah tahun 2001. Hal ini dipengaruhi oleh pajak reklame yang efektivitasnya tertinggi diantara pajak daerah sebesar 139,40% dan juga komponen pajak daerah lainnya dimana semua komponen pajak daerah melebihi target atau di atas 100% . Yaitu pajak hotel 103,50%, pajak restoran 101,20%, pajak hiburan 100,33%, pajak penerangan jalan umum 101,64%, pajak parkir 100,10 dan pajak rumah kost 108,62% . Tahun 2006

merupakan kinerja pemerintah yang sangat baik dari tahun 2001-2007 dengan kinerja sangat efektif dalam mengelola pajak daerah.

Pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 190.474.951.000 dengan efektivitasnya 102,06%. Tahun 2007 merupakan tahun pertama penurunan realisasi pajak daerah. tetapi jika dilihat dari realisasinya 102,06% merupakan melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun penurunan tingkat efektivitasnya terjadi karena terjadi penurunan pada komponen pajak daerah seperti pajak reklame 102,19%, pajak penerangan jalan umum 75,77% dan tidak adanya penerimaan dari pajak rumah kost. Sedangkan penerimaan dari pajak hotel meningkat menjadi 113,28%, pajak restoran 114,53%, pajak hiburan 122,47% dan pajak parkir 102,59%. Namun pada tahun 2007 jika dilihat dari persentasenya maka kinerja pemerintah kota Bandung dalam mengelola pajak daerah dikatakan sangat efektif.

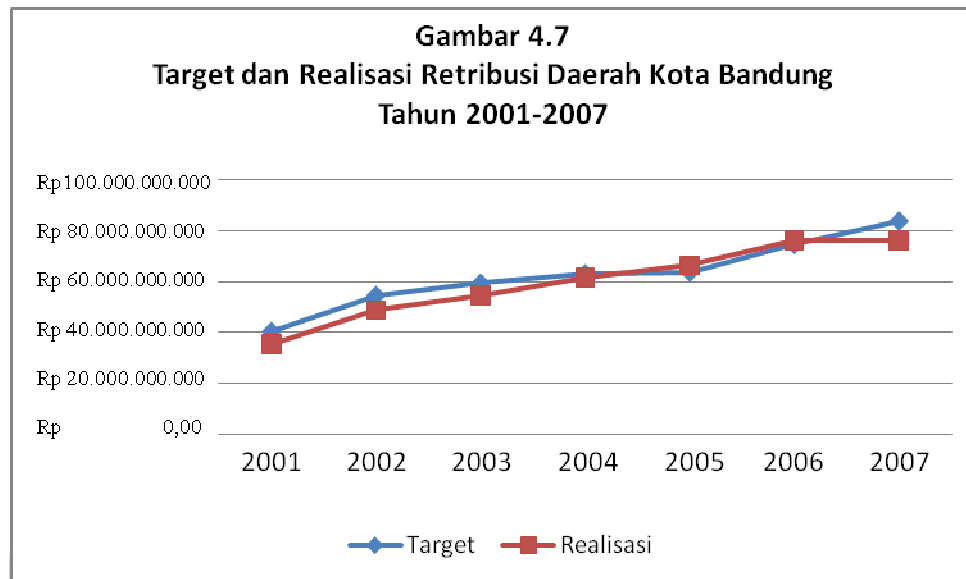
Setelah dianalisis komponen penerimaan pajak daerah kota Bandung sejak tahun 2001 hingga tahun 2007, maka selanjutnya disajikan tabel dan gambar retribusi daerah kota Bandung tahun 2001 hingga 2007 yang juga merupakan komponen dari pendapatan asli daerah :

Tabel 4.24
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivas (%)	Kriteria
2001	40.446.550.000	35.484.402.612	87,73	Cukup Efektif
2002	54.572.820.000	48.760.223.797	89,35	Cukup Efektif
2003	59.300.771.000	54.465.407.000	91,85	Efektif
2004	63.014.011.000	61.634.486.000	98	Efektif
2005	63.643.298.000	66.280.332.000	104,14	Sangat efektif

2006	74.527.551.000	76.015.063.000	102	Sangat efektif
2007	83.601.909.000	75.791.224.000	90,66	Efektif
Rata-rata	43.910.691.000	41.843.113.840	94,68%	Efektif

Sumber : Laporan dinas pendapatan daerah kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)



Sumber : Dinas pendapatan daerah kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)

Dilihat dari rasio efektivitas retribusi daerah kota Bandung pada tabel diatas, rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 104,14% dengan penerimaan terbesar dari retribusi pelayanan kesehatan dan resio efektivitas paling rendah terjadi pada tahun 2001 dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2002 penerimaan retribusi daerah meningkat dari tahun 2001 yang mencapai 89,35%. Penerimaan yang paling besar diterima dari retribusi pelayanan kesehatan dengan realisasinya mencapai 107,43% dengan nilai Rp 8.127.087.374. sedangkan penerimaan paling rendah dari retribusi sampah/kebersihan sebesar Rp 15.710.000 dengan efektivitas 112,21%. Tahun 2003 penerimaan retribusi semakin meningkat dengan efektivitasnya mencapai 91,85% dengan penerimaan terbesar diterima dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 10.204.125.000 dengan efektivitas

100,19%. Adapun penerimaan yang paling kecil adalah retribusi sampah sebesar Rp 24.200.000 tetapi dari persentasenya merupakan yang tertinggi dari komponen retribusi daerah sebesar 172,86%.

Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2004 juga mengalami peningkatan dengan efektivitas 98%. Penerimaan terbesar bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 12.646.391.000 dengan persentase efektivitas 105,52%. Sejak tahun 2001 hingga tahun 2004 kriteria efektivitas pemerintah kota Bandung untuk mengelola retribusi daerah masih dalam kategori efektif atau di bawah 100%. Sedangkan pada tahun 2005 terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah dengan efektivitasnya 104,14%. Hal ini dipengaruhi oleh ditambahnya jenis retribusi daerah yang pada tahun 2003 hanya berjumlah 16 jenis retribusi, kemudian mulai tahun 2004 menjadi 22 jenis retribusi dimana penerimaan terbesar tetap diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 13.380.293.000 dengan efektivitas 109,58%. Sedangkan efektivitas yang tertinggi diperoleh dari retribusi izin trayek dengan efektivitasnya 135,77%.

Pada tahun 2006 penerimaan retribusi daerah meningkat dengan efektivitasnya 102%. Dilihat dari efektivitasnya penerimaan retribusi daerah yang paling besar yaitu retribusi pelayanan kesehatan mengalami penurunan menjadi 96,58%. Efektivitas tertinggi dicapai oleh retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar 135,32%. Sedangkan pada tahun 2007 efektivitas penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan menjadi 90,66%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan komponen retribusi daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan tidak

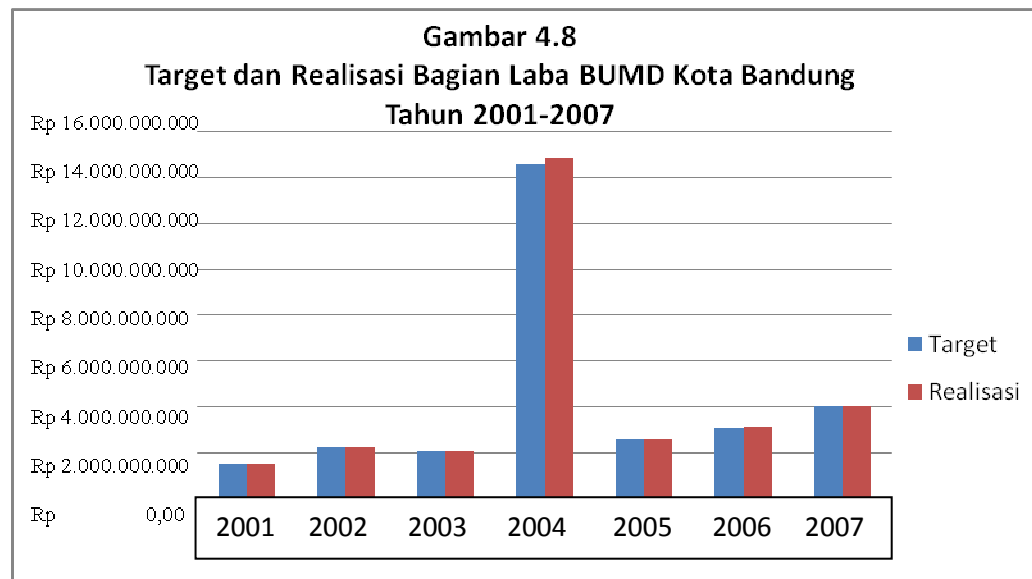
mencapai target yang hanya 76,05% dan retribusi lainnya yang rata-rata realisasinya hanya 90,66%.

Setelah dianalisis komponen pendapatan asli daerah yaitu retribusi pasar maka disajikan komponen pendapatan asli daerah berikutnya yaitu bagian laba BUMD kota Bandung tahun 2001-2007:

Tabel 4.25
Rasio Efektivitas Bagian Laba BUMD Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivas (%)	Kriteria
2001	1.501.769.951,29	1.501.769.951,29	100%	Efektif
2002	2.236.810.668	2.236.810.668	100%	Efektif
2003	2.060.000.000	2.060.481.417,61	100,02%	Sangat efektif
2004	14.600.000.000	14.854.649.000	102%	Sangat efektif
2005	2.552.953.000	2.552.953.000	100%	Efektif
2006	3.100.000.000	3.155.367.154,00	101,79%	Sangat efektif
2007	4.000.000.000	4000.000.000	100%	Efektif
Rata-rata	30.051.533.620	30.362.031.190	100,54 %	Sangat efektif

Sumber : Dinas pendapatan daerah kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)



Pada tabel rasio efektivitas laba BUMD di atas dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitasnya mencapai 100,54% dengan Kriteria sangat efektif dimana tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 102% dan terendah pada tahun terjadi pada tahun 2001,2002,2005 dan 2007 dengan kriteria efektif.

Seperti yang terlihat pada tabel target dan realisasi laba BUMD kota Bandung pada tahun 2001 hingga tahun 2007 bahwa antara target dan realisasi penerimaan bagian laba BUMD relatif sama jumlahnya. Hal ini disebabkan, karena sebelumnya telah diadakan kesepakatan mengenai jumlah penerimaan atau realisasi antara pemerintah daerah kota Bandung dengan pihak Badan Usaha Milik Daerah seperti pihak bank perkreditan rakyat atau bank pembangunan daerah.

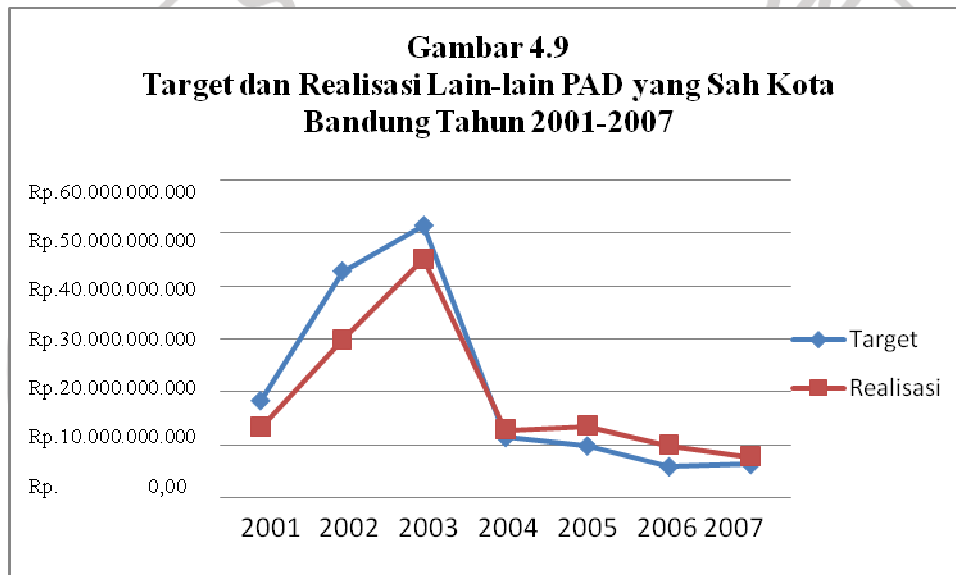
Setelah bagian laba BUMD dibahas maka selanjutnya disajikan data tabel dan gambar lain-lain PAD yang sah kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007 yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli daerah:

Tabel 4.26

Rasio Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2001	18.384.028.200	13.415.244.714,84	72,97%	Kurang Efektif
2002	42.790.086.900	29.857.965.938	69,78%	Kurang Efektif
2003	51.376.000.000	45.165.986.000	87,91%	Cukup efektif
2004	11.428.000.000	12.865.822.000	113%	Sangat efektif
2005	9.854.000.000	13.655.329.000	138,58%	Sangat Efektif
2006	5.949.000.000	9.931.082.809,87	166,94%	Sangat efektif
2007	6.347.674.500	7.753.745.500	122,15%	Sangat efektif
Rata-rata	146.128.789.600	132.645.175.900	110,19	Sangat efektif

Sumber : Dinas pendapatan daerah kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)



Dilihat dari rasio efektivitas lain-lain PAD kota Bandung di atas, rata-rata rasio efektivitas lain-lain PAD yang sah sebesar 110,19%. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 166,94% dan terendah pada tahun 69,78% dengan kriteria kurang efektif.

Dari tabel lain-lain PAD yang sah kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007, terlihat bahwa target dan realisasi lain-lain PAD yang sah menunjukkan kecenderungan yang naik turun. Hal ini disebabkan karena dalam pos lain-lain

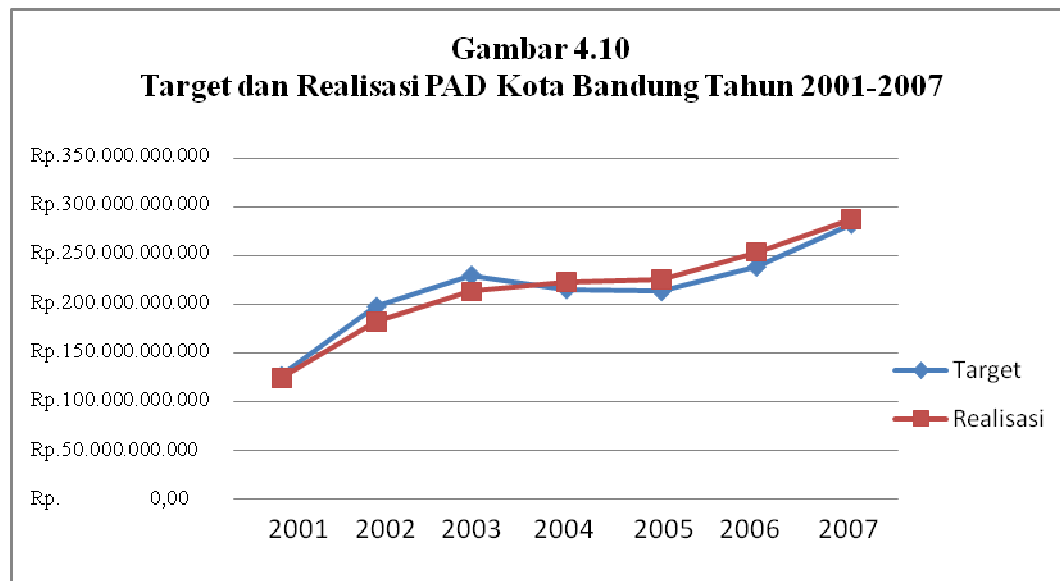
PAD ini merupakan sisa dari pos sebelumnya dan kadangkala sifatnya insidental (tidak selalu ada) seperti penerimaan jasa deposito, denda keterlambatan pelayanan pekerjaan, jasa giro dan lain-lain. Oleh karena itu penetapan anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah ini, pemerintah daerah tidak bisa menetapkan kenaikan setiap tahunnya, tetapi harus disesuaikan dengan situasi yang ada.

Setelah dianalisis satu persatu komponen dari pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007 maka disajikan tabel dan gambar dari hasil komponen pendapatan asli daerah tersebut menjadi pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2001-2007:

Tabel 4.27
Rasio Efektivitas PAD Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio efektivitas	Keterangan
2001	126.782.348.151,29	123.984.485.749,23	97,79%	Efektif
2002	197.699.717.568,00	182.064.238.544,02	92,09%	Efektif
2003	229.749.164.455,00	213.029.461.862,25	92,72%	Efektif
2004	215.114.010.650,00	222.909.941.952,75	103,62%	Sangat efektif
2005	213.100.251.482,00	225.596.438.613,00	105,86%	Sangat efektif
2006	238.305.532.000,00	253.882.919.542,87	106,54%	Sangat efektif
2007	281.981.583.000,00	287.555.539.000,00	101,98%	Sangat efektif
Rata-rata	214.671.801.000,00	215.574.717.900,00	100,42%	Sangat efektif

Sumber : laporan APBD kota Bandung tahun 2001-2007(data diolah)



Pada tabel rasio efektivitas PAD di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasionya sebesar 100,42% dengan kriteria sangat efektif. Untuk tahun 2001 sampai 2003 rasio efektivitasnya masih berada pada kategori efektif atau di bawah 100%. Sedangkan pada tahun 2004 hingga tahun 2007 rasio efektivitasnya berada di atas 100% dengan kategori sangat efektif. Perolehan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 106,54% dan terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 92,09% dengan kategori efektif.

Berhasilnya pencapaian total PAD dengan rata-rata 100,42% disebabkan karena dari keempat sumber PAD, hanya retribusi daerah yang rata-ratanya hanya sebesar 96,47% dengan kriteria efektif, selebihnya berada pada kriteria sangat efektif atau tercapai target seperti pajak daerah sebesar 106,86%, bagian laba BUMD sebesar 100,54% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 110,19%.

4.2.5 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Bandung

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha meningkatkan PAD melalui salah satu komponen pajak daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan pajak reklame. Berikut tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi pajak reklame dalam upaya meningkatkan jumlah PAD di kota Bandung :

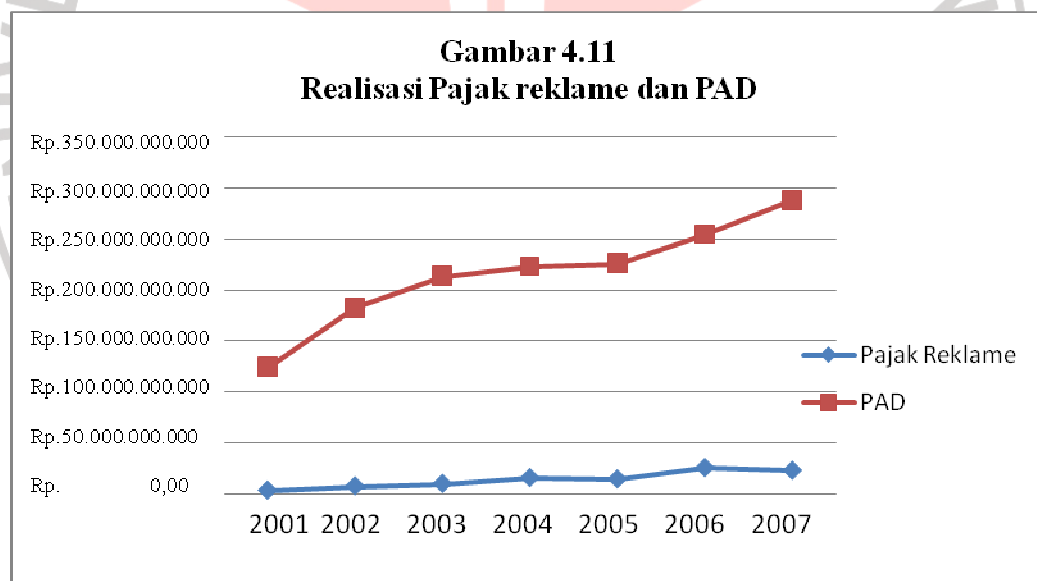


Tabel 4.28

Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bandung

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi	Keterangan
2001	3.600.800.167	123.984.485.749,23	2,90%	Sangat kurang
2002	7.901.111.760	182.064.238.544,02	4,34%	Sangat kurang
2003	10.302.704.000	213.029.461.862,25	4,84%	Sangat kurang
2004	16.211.576.000	222.909.941.952,75	7,27%	Sangat kurang
2005	14.841.996.000	225.596.438.613,00	6,58%	Sangat kurang
2006	26.103.432.000	253.882.919.542,87	10,28%	Kurang
2007	23.416.691.000	287.555.539.000,00	8,14%	Sangat kurang
Rata-rata	14.625.472.990	215.574.717.900,00	6,78%	Sangat kurang

Sumber : Laporan APBD kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)



Tabel 4.29
Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2001-2007

Jenis Pajak Daerah	Kontribusi (%)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pajak Hotel dan Pajak restoran	37,13%	31%	29,31%	29,46%	17,38%	17,44%	20,43%
Pajak Hiburan	5,11%	5,25%	4,67%	4,54%	4,67%	4,50%	5,50%
Pajak Reklame	2,90%	4,34%	4,84%	7,27%	6,58%	10,22%	8,14%
Pajak Penerangan Jalan Umum	12,15%	13,93%	15,27%	17,02%	18,27%	16,82%	13,81%
Pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan	1,98%	0,79%	-	-	-	-	-
Pajak parkir	0,081%	-	-	1,28%	1,46%	1,44%	1,50%
Pajak lainnya	-	1,37%	-	-	-	-	-
Pajak rumah kost	-	-	-	0,0013	0,026	0,045%	-

Sumber : Data diolah

Dilihat dari tabel diatas rasio kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah rata-rata hanya 6,78% yang berarti sangat kurang atau rendah kontribusi pajak reklame terhadap PAD. Pencapaian kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 10,28%. Dilihat dari besar kecilnya kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame terhadap PAD kota Bandung ini dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi penerimaan pajak reklame dan besar kecilnya realisasi PAD. Adapun komponen pajak reklame yang paling besar kontribusinya terhadap pajak reklame pada tahun 2007 adalah

papan/billboard dengan kontribusinya sebesar 78,5% terhadap penerimaan pajak reklame.

Jika dianalisis pada tahun 2001 penerimaan pajak reklame terhadap PAD hanya menempati urutan ke empat dari pajak daerah dimana persentasenya hanya 4,9% terhadap pajak daerah. Sedangkan penerimaan tertinggi diperoleh dari pajak hotel dan restoran dengan persentase 62,55% yang diikuti oleh pajak penerangan jalan umum dengan persentase 20,5% terhadap pajak daerah. Sedangkan dilihat dari kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2001 terhadap PAD maka rasionya adalah 37,13% dan 12,14%. Jika dilihat dari persentasenya terhadap PAD, pajak daerah merupakan yang tertinggi sebesar 59,35% dibandingkan sumber PAD lainnya. Oleh karena itu kontribusi pajak reklame pada tahun 2001 terhadap PAD memang sangat kurang jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya dalam komponen PAD.

Pada tahun 2002 kontribusi pajak reklame terhadap PAD hanya sebesar 4,34%. Ini merupakan kenaikan sebesar 1,44% yang pada tahun 2001 kontribusinya hanya 2,90%. Walaupun terjadi kenaikan tetapi besarnya penerimaan pajak reklame hanya menempati posisi ke empat dari komponen pajak daerah, yakni setelah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan umum. Posisi tiga pada tahun 2001 digeser oleh pajak hiburan yang meningkat 50% dari Rp.6.335.449.004 pada tahun 2001 menjadi Rp.9.522.676.132 pada tahun 2002. Sebelumnya pajak reklame juga mengalami peningkatan penerimaan yang cukup besar yaitu 121% dimana pada tahun 2001 penerimaan pajak reklame sebesar 3.600.800.167 dan pada tahun 2002 meningkat

sebesar Rp.7.971.603.520. Ini merupakan kinerja yang baik bagi pemerintah karena laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2002 sangat baik tetapi besarnya penerimaannya masih lebih kecil dari penerimaan pajak hotel dan restoran dimana besarnya penerimaan mencapai Rp.56.434.696.206 dengan kontribusinya terhadap pajak daerah sebesar 54,71% dan terhadap PAD sebesar 30,99%.

Penerimaan Komponen pendapatan asli daerah pada tahun 2002 yang paling besar diperoleh dari pajak daerah dengan kontribusinya terhadap PAD sebesar 56,66% dan disusul oleh retribusi daerah sebesar 26,78%. Penerimaan retribusi daerah yang paling besar diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan dengan realisasi Rp.8.127.087.374 dan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp.7.911.442.802. Penerimaan retribusi ini lebih besar dari penerimaan pajak reklame kota Bandung.

Selanjutnya pada tahun 2003 kontribusi pajak reklame terhadap PAD sebesar 4,84%. Terjadi kenaikan kontribusi dari tahun 2003 sebesar 0,5% dengan realisasinya Rp.10.302.704.425, laju pertumbuhannya 29,24% dan efektivitasnya 85,56%. Kenaikan ini terjadi dipengaruhi oleh peraturan daerah kota Bandung No.08 tahun 2003 tentang pajak reklame menggantikan perda tingkat II Bandung No. 18 tahun 2001 yang menekankan pada tata cara penagihan pajak. Kenaikan pajak reklame juga diikuti oleh kenaikan pajak hotel dan restoran sebesar Rp.62.439.288.000 sebagai penerimaan terbesar dari komponen pajak daerah dengan kontribusinya terhadap pajak daerah sebesar 53,18% dan terhadap PAD sebesar 29,31%. Sedangkan dari komponen retribusi daerah penerimaan terbesar diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.10.204.125.000.

penerimaan terbesar yang diperoleh retribusi daerah lebih kecil dari penerimaan pajak reklame dengan selisih Rp.98.579.000 dan hal ini menjadi kemajuan terhadap pajak reklame kota Bandung dimana pada tahun 2002 penerimaan pajak reklame masih lebih kecil dari retribusi pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2004 kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD semakin meningkat sebesar 7,27% atau 2,43% dari tahun 2003. Peningkatan kontribusi ini dipengaruhi program dicanangkannya Bandung sebagai kota wisata dan hal ini menjadikan banyak investor masuk ke kota Bandung. Peningkatan ini juga diikuti oleh peraturan tentang pemisahan rekening yang dulunya pajak hotel dan restoran menjadi pajak hotel dan pajak restoran. Penerimaan terbesar dari pajak daerah diperoleh dari pajak hotel dan pajak penerangan jalan umum. Dengan kontribusinya terhadap PAD sebesar 29,46% dan 17%. Sedangkan dari retribusi daerah penerimaan terbesar diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan dengan kontribusinya terhadap PAD sebesar 5,6%.

Tahun 2005 kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan yakni 6,58% atau 0,67% dari tahun 2004. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah reklame yang berkurang dan peningkatan komponen PAD lainnya. Pajak penerangan jalan umum merupakan penerimaan terbesar dari komponen pajak daerah dan PAD dengan kontribusinya terhadap PAD sebesar 18,27%. Kemudian diikuti oleh pajak hotel sebesar 17,38%.

Penerimaan pajak reklame pada tahun 2006 merupakan penerimaan tertinggi yakni Rp.26.103.432.000 atau laju pertumbuhannya sebesar 75,87% dari tahun 2005 dan efektivitasnya mencapai 139,40%. Maka dengan penerimaan yang

tinggi pada tahun 2006 maka kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD semakin meningkat sebesar 10,28% atau 3,7% dari tahun 2005. Kenaikan ini dipengaruhi oleh jumlah reklame yang semakin meningkat dengan 8034 buah reklame pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005 yang berjumlah 6898 buah. Adapun rinciannya papan/billboard berjumlah 6745 buah, spanduk 1073 buah, balon 8 buah, reklame kendaraan 190 buah dan Bando/JPO 18 buah. Penerimaan pajak reklame terbesar diperoleh dari pajak papan/billboard dengan jumlah yang juga banyak. Faktor kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklamenya. Pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap PAD juga dipengaruhi oleh besarnya penerimaan komponen PAD terhadap realisasi PAD tersebut.

Pada tahun 2007 merupakan penurunan pajak reklame yang pertama kali sejak tujuh tahun terakhir dimana realisasinya Rp.23.416.691.000 dibandingkan tahun 2006 yang realisasinya Rp.26.103.431.700 atau laju pertumbuhannya turun 10,29%. Penurunan ini berdampak pada kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD sebesar 8,14% atau turun 2,14% dari tahun 2006. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tunggakan pajak reklame yang tertinggi dari tunggakan komponen pajak daerah lainnya sebesar Rp.4.400.000.000, diberlakukannya kawasan bebas reklame dengan 6 titik ruas jalan raya yang berpotensi kehilangan Rp.5.400.000.000 dan penurunan jumlah reklame dari 8034 buah pada tahun 2006 menjadi 6586 buah pada tahun 2007.

1.2.6 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kota Bandung Tahun 2001

Hingga Tahun 2007

Tingkat kemandirian daerah dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Total penerimaan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dan ditambah dana alokasi umum. Berikut data realisasi pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi umum (DAU) dan total pendapatan daerah (TPD) kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007 :

Tabel 4.30
Realisasi PAD, BHPBP, DAU dan TPD Kota Bandung
Tahun 2001-2007

Tahun	Realisasi (Rp)			TPD (Rp)
	PAD	BHPBP	DAU	
2001	123.984.485.749,23	130.370.009.264,47	341.618.150.032	595.972.645.045
2002	182.064.238.544,02	137.744.617.855,00	388.260.000.000	708.068.856.399
2003	213.029.461.862,25	145.233.380.232,00	416.680.000.000	774.942.842.000
2004	222.909.941.952,75	207.809.512.316,00	439.689.469.000	870.408.923.245
2005	225.596.438.613,00	198.538.126.887,00	458.072.000.000	882.206.565.465
2006	253.882.919.542,87	219.227.383.243,00	632.379.000.000	1.105.489.302.785
2007	287.555.539.000,00	218.823.169.675,00	827.608.000.000	1.333.986.709.000

Sumber : Laporan APBD kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)

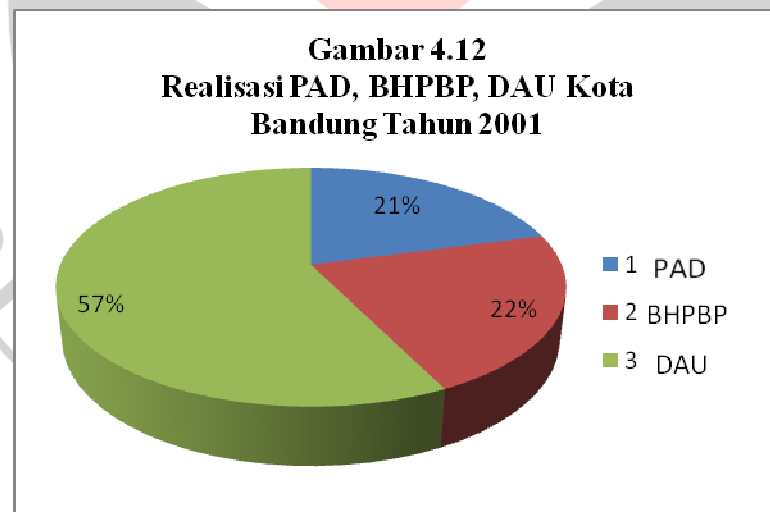
Berikut disajikan tabel realisasi pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum kota Bandung tahun 2001 hingga 2007 :

Tabel 4.31
Rasio Kemandirian Daerah Kota Bandung Tahun 2001-2007

Tahun	Rasio PAD	Rasio BHPBP	Rasio DAU
2001	20,80%	21,87%	57,32%
2002	25,71%	19,45%	54,83%
2003	27,49%	18,74%	53,77%
2004	25,61%	23,87%	50,52%
2005	25,57%	22,50%	51,92%
2006	22,96%	19,83%	57,20%
2007	21,56%	16,40%	62,04%
Rata-rata	24,24%	20,38%	55,37

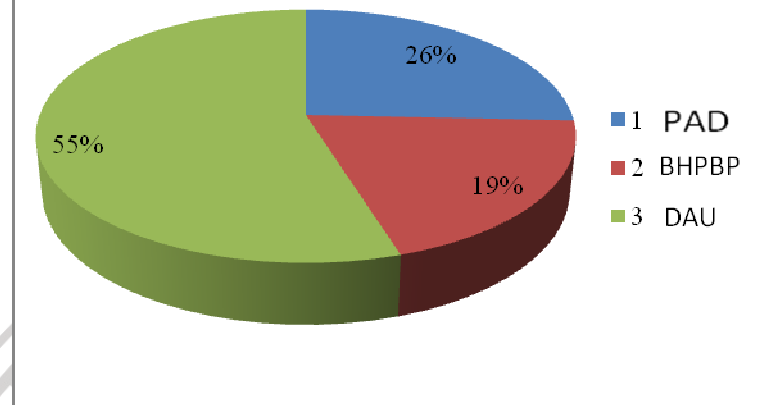
Sumber :hasil penelitian (diolah kembali)

Berikut gambar diagram struktur realisasi pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007 :



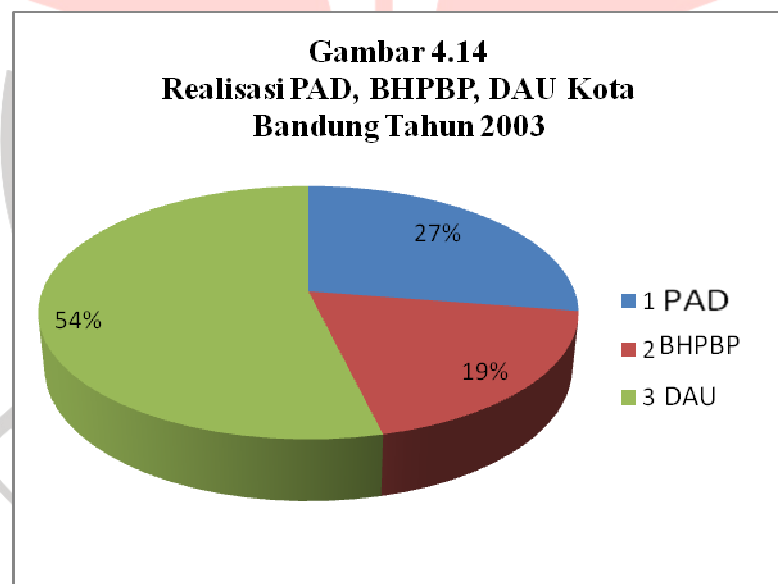
Sumber : Laporan APBD Kota Bandung tahun 2001 (data diolah)

Gambar 4.13
Realisasi PAD, BHPBP, DAU Kota
Bandung Tahun 2002



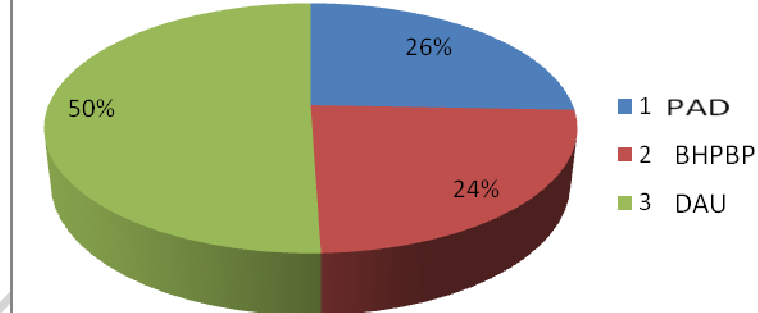
Sumber : Laporan APBD Kota Bandung tahun 2002 (data diolah)

Gambar 4.14
Realisasi PAD, BHPBP, DAU Kota
Bandung Tahun 2003



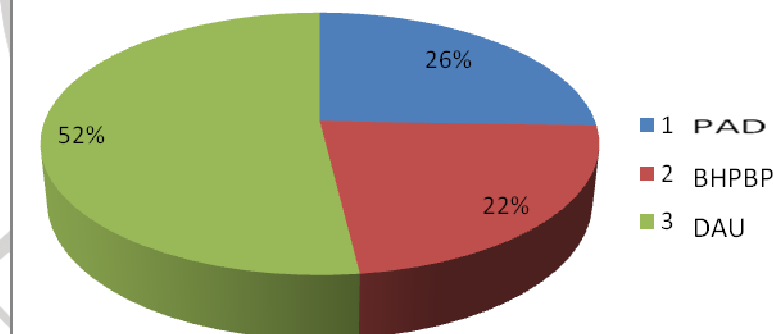
Sumber : Laporan APBD kota Bandung tahun 2003 (data diolah)

Gambar 4.15
Realisasi PAD, BHPBP, DAU Kota
Bandung Tahun 2004

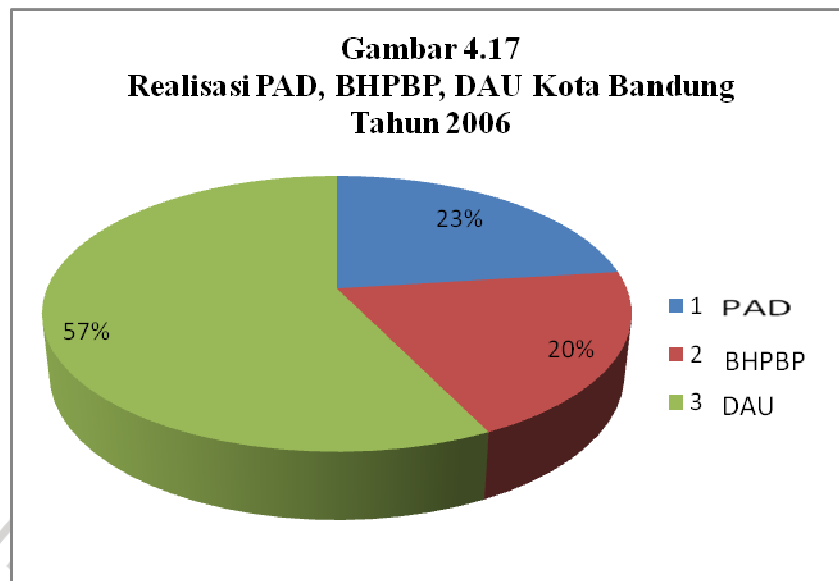


Sumber :Laporan APBD kota Bandung Tahun 2004 (data diolah)

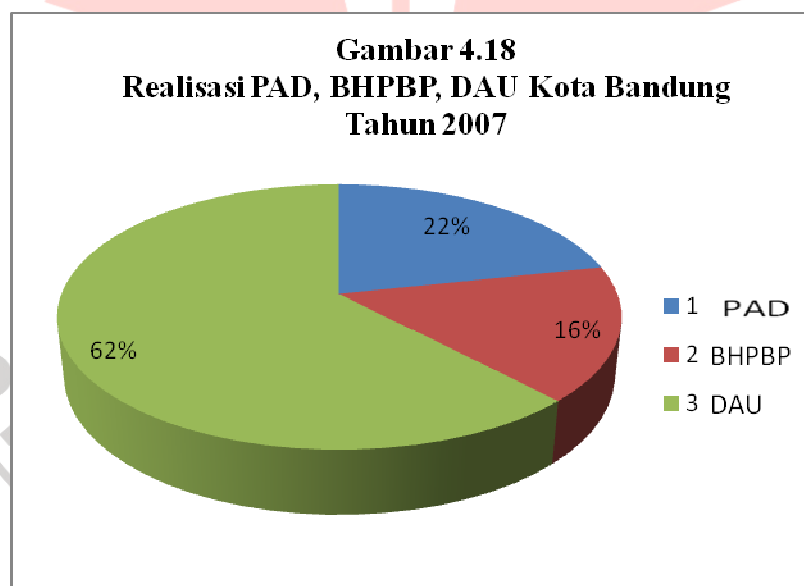
Gambar 4.16
Realisasi PAD, BHPBP, DAU Kota Bandung
Tahun 2005



Sumber :Laporan APBD kota Bandung tahun 2005 (data diolah)



Sumber :Laporan APBD kota Bandung tahun 2006 (data diolah)



Sumber :Laporan APBD kota Bandung tahun 2007 (data diolah)

Setelah disajikan data berupa tabel dan diagram realisasi PAD,BHPBP dan DAU, sekarang disajikan tabel tingkat kemampuan daerah kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007:

Tabel 4.32
Tingkat Kemampuan Daerah Kota Bandung

Tahun	Rasio PAD	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
2001	20,80%	Instruktif	Rendah sekali
2002	25,71%	Konsultatif	Rendah
2003	27,49%	Konsultatif	Rendah
2004	25,61%	Konsultatif	Rendah
2005	25,57%	Konsultatif	Rendah
2006	22,96	Instruktif	Rendah
2007	21,56%	Instruktif	Rendah sekali
Rata-rata	24,24%	Instruktif	Rendah sekali

Sumber : hasil penelitian (diolah kembali)

Dilihat dari tabel di atas, rasio kemandirian daerah kota Bandung tahun 2001 hingga 2007 rata-rata hanya sebesar 24,24% terhadap pendapatan daerah, selebihnya didominasi oleh BHPBP dan DAU. Jika dilihat dari pola hubungan kota Bandung masih dalam pola instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah yang berarti kemampuan keuangan pemerintah daerah kota Bandung masih rendah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sejak pemerintah memberlakukan otonomi daerah pada tahun 2001 peranan bantuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kota Bandung masih sangat kuat hingga tahun 2007. Sentralisasi yang dulunya diterapkan pemerintah pusat menyebabkan rendahnya kreativitas daerah, yang menyebabkan pemerintah daerah sangat bergantung terhadap pemerintah pusat berdampak juga terhadap otonomi daerah. berbagai masalah yang dihadapi dalam otonomi daerah yang menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat antara lain potensi

PAD yang belum tergali secara optimal, kebutuhan daerah dalam mengelola keuangannya seperti belanja daerah yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya, keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Pada tahun 2001 tingkat kemampuan daerah kota Bandung hanya sebesar 20,80%. Hal ini dapat disebabkan karena awal tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah pemerintah sedang dalam tahap penyesuaian otonomi daerah sehingga bantuan dari pemerintah pusat relatif besar terhadap pemerintah daerah.

Pada tahun 2002 sampai tahun 2003, rasio kemandirian daerah kota Bandung mengalami peningkatan yaitu berturut-turut sebesar 25,71% dan 27,49% dengan pola hubungan konsultatif atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Ini merupakan awal yang baik bagi kinerja pemerintah, karena setahun setelah otonomi daerah tingkat kemampuan daerah meningkat 4,91% dari tahun 2001 dan pada tahun 2003 meningkat lagi 1,78%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh komponen PAD yang juga meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2004 sampai tahun 2005, rasio kemandirian daerah mengalami penurunan sebesar 25,61% dan 25,57%. Walaupun rasio kemandirian daerahnya mengalami penurunan tetapi pola hubungannya konsultatif dengan kemampuan keuangan rendah. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan komponen PAD yang kecil dan penerimaan bantuan pemerintah pusat yang besar yang menjadikan persentase tingkat kemampuan daerah menjadi turun atau kecil.

Pada tahun 2006 rasio kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 22,97% sehingga pola hubungannya menjadi instruktif dan

pada tahun 2007 juga mengalami penurunan menjadi 21,56% dengan pola hubungan instruktif, yaitu pemerintah daerah kota Bandung belum mampu mengelola keuangan daerahnya dan memerlukan campur tangan pemerintah pusat yang lebih dominan. Hal ini disebabkan masih banyaknya potensi PAD yang belum tergali akibat banyaknya komponen PAD yang belum terdata seperti komponen pajak daerah dan retribusi daerah. hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajaknya guna membangun daerah kota Bandung.

Oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah daerah kota Bandung, pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam mengoptimalkan potensi PAD diharapkan memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah. Seperti dalam penelitian ini yang memfokuskan pada pajak reklame bahwa masih banyak reklame yang belum terdata dan tunggakan pajak reklame yang sangat tinggi. Sangat disayangkan jika nama kota Bandung sebagai kota besar belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Adapun usaha pemerintah di tahun 2008 yang memberlakukan NPWP (sunset policy) sangat diterima masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah kota Bandung untuk meningkatkan pendapatannya adalah mempromosikan kota Bandung sebagai kota tujuan wisata sehingga seluruh komponen PAD dapat meningkat. Seperti penerimaan dari pajak hotel dan restoran yang meningkat akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame karena akan dikenakan pajak reklame juga,

dan akan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya kepada kota Bandung.

Tetapi juga harus diingat upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya tidak harus mengeksploitasi sumber-sumber pendapatan tersebut. Contohnya, Seperti pada pajak reklame agar meningkatkan penerimaan pajak reklame, maka mengabaikan keindahan kota. Ada upaya lain agar penerimaan pajak meningkat dan tidak merugikan masyarakat dan keindahan kota. Seperti diterapkan kawasan bebas reklame maka untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak reklame maka pemerintah menerapkan sistem lelang untuk kawasan tertentu yang potensinya banyak peminat untuk menyelenggarakan reklame.

Seperti hasil wawancara penulis terhadap wakil kordinator pajak reklame di dinas pendapatan daerah kota Bandung, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame antara lain melakukan pendataan wajib pajak, menggali sumber- sumber potensi yang memungkinkan menjadi objek pajak, serta konsultasi dan kerjasama yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini badan penanaman modal pelayanan perijinan terpadu (BPMPPPT) dan dinas pertamanan kota Bandung.